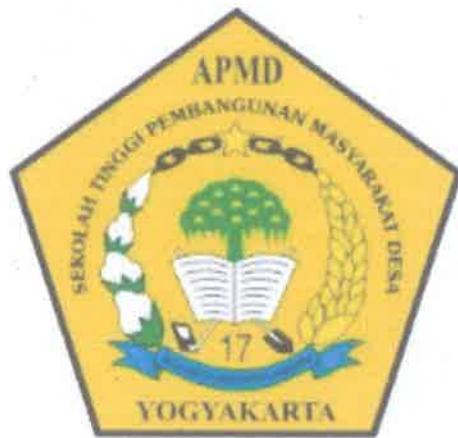


**PEMERINTAH DALAM PENDAMPINGAN USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH DI KALURAHAN GUWOSARI, KAPANEWON
PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)**



Disusun Oleh:

YOHANES RIVALDO TENGKO

NIM 21520052

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

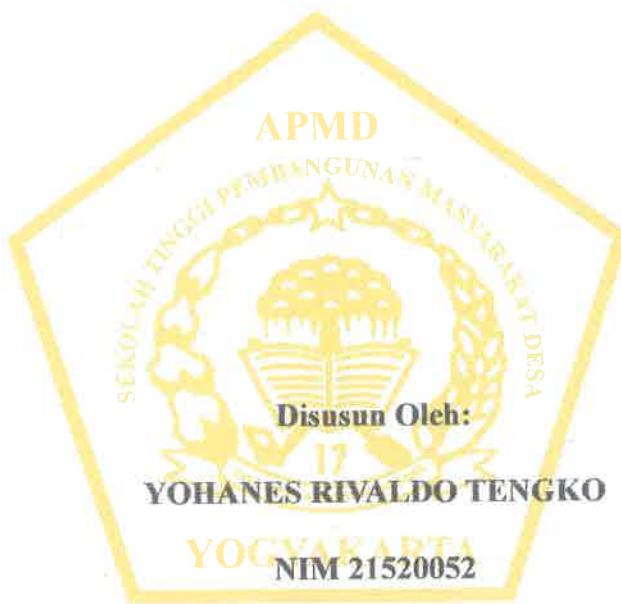
2025



**PEMERINTAH DALAM PENDAMPINGAN USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH DI KALURAHAN GUWOSARI, KAPANEWON
PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)**



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 11 Juli 2025

Jam : 11.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta



Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si.

Ketua Penguji/Pembimbing

Tanda Tangan

Dr. Gregorius Shadan, S.I.P., M.A.

Penguji Samping 1

Dr. Irsasri, M.Pd.

Penguji Samping 2

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A.

NIDN. 051108730

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yohanes Rivaldo Tengko

NIM : 21520052

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
**“Pemerintah dalam Pendampingan Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah di
Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajang, Kabupaten Bantul”** adalah hasil
karya tulis saya yang dibuat sendiri sebagai salah satu kewajiban dalam
menyelesaikan jenjang Strata Sar (S-1) di Sekolah Tinggi Pembangunan
Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Semoga data yang digunakan dalam penelitian ini tercantum sesuai dengan
penulisan karya ilmiah. Apabila pada kemudian hari terdapat penemuan adanya
tindakan plagiarisme maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang
berlaku.

Yogyakarta, Jumat 11 Juli 2025

Penulis



Yohanes Rivaldo Tengo

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : YOHANES RIVALDO TENGKO
NIM : 21520052
Telp : 088983424402
Email : Rival_tengko@icloud.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Dengan ini memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Pemerintah dalam Pendampingan Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajang, Kabupaten Bantul" beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas penyelenggaraan Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 11 Juli 2025
Yang Membuat Pernyataan



Yohanes Rivaldo Tengko

21520052

MOTTO

Lights Will Guide You Home

(Fix You, Coldplay)

Jiwaku tenang hanya pada Tuhan; karena harapan saya adalah dari-Nya

(Mazmur 62: 5)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya mempersembahkan karya ini kepada kedua orang tua saya, kakak, adik, dan semua keluarga besar, serta keluarga besar Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan ramhmat yang melimpah atas diri saya, terkhusus atas proses pengerjaan karya ini. Karya ini merupakan hasil kerja yang didukung oleh banyak pihak dan doa orang tua serta keluarga. Maka saya mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Alamamater tercinta Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat saya menimba ilmu selama kurang lebih empat tahun.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunarto, M.Si, selaku ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Jaka Tri Widaryanta, M.Si. selaku pembimbing yang telah dengan sabar mengajari saya banyak hal terkait penelitian.
4. Bapak/Ibu dosen pengajar program studi Ilmu Pemerintahan yang telah membagi ilmu kepada saya selama kurang lebih 4 tahun.
5. Pemerintah kalurahan Guwosari dan para pelaku UMKM di Guwosari yang telah memberi kesempatan kepada saya melakukan dan menuntaskan penelitian ini.
6. Terimaksih kepada keluarga besar saya, Bapa, Mama, Kakak, dan Adik. Serta kelurga kos Godfather yang selama ini telah menemani saya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
INTISARI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. <i>Literatur Review</i>	6
G. Kerangka Teori	16
1. Government (Pemerintah).....	16
2. Pemerintah Kalurahan	22
3. UMKM.....	24
4. Pendampingan	28
H. METODE PENELITIAN.....	29
1. Jenis penelitian	29
2. Objek Penelitian.....	30
3. Subjek Penelitian.....	30
4. Lokasi Penelitian.....	31
5. Teknik Pengumpulan Data	31
6. Teknik Analisis Data	33

BAB II GAMBARAN UMUM USAHA MIKRO KECIL DAN MENGEAH (UMKM) DAN KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN	36
A. Sejarah Kalurahan Guwosari.....	36
B. Kondisi Geografis Kalurahan Guwosari	38
C. Batas Wilayah.....	40
D. Kondisi Demografi.....	41
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	41
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	42
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	43
E. Sosial Ekonomi	46
1. Kawasan Pertanian	47
2. Kawasan Pusat Pemerintahan	47
3. Kawasan Kerajinan	47
4. Kawasan Wisata Kuliner Ingkung.....	48
5. Kawasan Peternakan	48
F. Sarana dan Prasarana.....	48
G. Pemerintahan Kalurahan Guwosari.....	49
H. Gambaran Umum UMKM di Kalurahan Guwosari.....	53
1. Unit Usaha UMKM di Kalurahan Guwosari	54
2. Persebaran UMKM di Wilayah Kalurahan Guwosari.....	57
3. Pelaku usaha UMKM Guwosari Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
BAB III PEMERINTAH DALAM PENDAMPINGAN UMKM DI KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PANJANG, KABUPATEN BANTUL	62
A. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kalurahan dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kalurahan Guwosari	62
1. Peran Regulator.....	62
2. Peran Dinamisator.....	66
3. Peran Fasilitator	67
B. Program dan Kebijakan Pemerintah Kalurahan Guwosari dalam Memberdayakan UMKM	70
1. Program Desa Preneur.....	70
2. Program Pendukung.....	73
C. Pembahasan.....	76

1.	Aturan dan Fungsi Mengatur (Regulator)	76
2.	Kebijakan dan Fungsi Mengurus (Administratif/Dinamisator)	77
3.	Kebijakan Pelayanan dan Fungsi Melayani (Fasilitator)	77
4.	Kekuasaan dan Fungsi Mengatur dan Mengurus	78
	BAB IV PENUTUP	79
A.	Kesimpulan	79
B.	Saran.....	80
1.	Bagi Pemerintah Kalurahan Guwosari.....	80
2.	Bagi Pelaku UMKM	80
3.	Bagi Penelitian Selanjutnya	81
	DAFTAR PUSTAKA	82
	LAMPIRAN	85
A.	Panduan Wawancara	85
B.	Foto	86
C.	Data UMKM di Guwosari.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sejarah Kepemimpinan Kalurahan Guwosari	38
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	41
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	43
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	45
Tabel 2. 5 Pemerintahan Kalurahan Berdasarkan Jabatan	51
Tabel 2. 6 Daftar Unit Usaha UMKM Kalurahan Guwosari	55
Tabel 2. 7 Persebaran UMKM di Kalurahan Guwosari	57
Tabel 2. 8 Pelaku UMKM Guwosari Berdasarkan Jenis Kelamin.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Kalurahan Guwosari.....	39
Gambar 3. 1 Countainer Box	69
Gambar 3. 2 Rak Penjualan.....	69
Gambar 3. 3. Kegiatan Desa Preneur Bersama Satu Asa, Agustus 2024	72
Gambar 3. 4 Kunjungan Desa Preneur ke Kalurahan Sriharjo, Mei 2024.....	72

INTISARI

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah sejauh mana pendampingan pemerintah Kalurahan Guwosari dalam pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi lokal. Fokus penelitian ini terletak pada pelaksanaan kewenangan pemerintah kalurahan dalam memberdayakan UMKM, program dan kebijakan yang dijalankan, serta berbagai hambatan yang dihadapi. Rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam mendukung keberlangsungan UMKM di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari aparatur pemerintah Kalurahan Guwosari, pelaku UMKM, serta masyarakat lokal. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi.

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa Pemerintah Kalurahan Guwosari telah berperan aktif sebagai regulator melalui penyusunan kebijakan dan pelatihan UMKM, sebagai dinamisator dengan mendorong kolaborasi antar pelaku usaha, serta sebagai fasilitator dalam menyediakan bantuan peralatan dan akses promosi melalui program Danais. Program unggulan seperti “Desa Preneur” terbukti memberikan peningkatan kapasitas pada sebagian pelaku usaha. Namun, tantangan tetap ada, seperti rendahnya literasi digital, minimnya partisipasi generasi muda, serta kurangnya evaluasi berkala dari pemerintah terhadap efektivitas program. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas SDM dan peningkatan sistem monitoring yang lebih berkelanjutan.

Kata Kunci: *Government, Pemerintah Kalurahan, Pendampingan, UMKM*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong terciptanya kemandirian desa. Undang-undang ini memberikan ruang yang lebih luas bagi desa untuk menggali dan mengelola potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai dengan kebutuhan lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian desa diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, terutama dalam sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat karena mencerminkan peningkatan output per kapita dan daya beli masyarakat (Todaro & Smith, 2015).

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat vital. UMKM mampu membuka lapangan pekerjaan, mendorong pemerataan pendapatan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi lokal di tengah gempuran produk impor dan perubahan pasar global. Oleh karena itu, perhatian dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah, menjadi penting dalam memperkuat eksistensi dan daya saing UMKM. Pemerintah diharapkan tidak hanya hadir dalam bentuk regulasi, tetapi juga sebagai fasilitator dan dinamisator yang mampu mengakselerasi pengembangan UMKM melalui pelatihan, bantuan permodalan, serta

penyediaan infrastruktur pendukung (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023).

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui pemrograman Dana Keistimewaan (Danais) mencanangkan berbagai program pembangunan berbasis desa, salah satunya melalui program *Desa Mandiri Budaya* dan penguatan UMKM desa. Program ini ditujukan untuk menciptakan warga desa maju dengan mendorong penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Danais digunakan sebagai instrumen pendukung dalam pengembangan desa yang meliputi pelatihan kewirausahaan, pemberian alat produksi, promosi produk unggulan, hingga pembentukan jejaring pasar.

Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul merupakan salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Topografi wilayah yang berada di kawasan Pegunungan Karst menjadikan Guwosari memiliki keanekaragaman hayati dan karakteristik lahan yang beragam. Hal ini mendorong berkembangnya sektor agraris yang kemudian diolah menjadi produk-produk bernilai ekonomi oleh pelaku UMKM, seperti olahan makanan tradisional (keripik pisang, seblak, sempol ayam) serta produk kerajinan tangan (handicraft). Produk-produk tersebut telah didistribusikan ke luar wilayah Guwosari dan menjadi penopang roda perekonomian lokal.

Dalam praktiknya, Pemerintah Kalurahan Guwosari telah menjalankan perannya sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam pemberdayaan UMKM. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan sarana penjualan seperti

toko khusus produk UMKM, menyalurkan bantuan modal dan alat produksi melalui Danais dan APBKal, serta mengikutsertakan pelaku UMKM dalam event promosi seperti bazar. Sebagai regulator, Pemerintah Kalurahan menyelenggarakan pelatihan yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY, seperti program “Desa Interpreneur” yang diadakan setiap tahun. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam hal produksi dan pemasaran digital.

Meskipun demikian, efektivitas dari program-program tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Data menunjukkan bahwa sekitar 50% pelaku UMKM sudah mampu memanfaatkan media digital, namun sebagian lainnya masih mengalami kesulitan akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam hal penggunaan teknologi dan manajemen pemasaran. Selain itu, dominasi pengelolaan UMKM oleh ibu rumah tangga serta minimnya partisipasi generasi muda juga menjadi tantangan tersendiri. Promosi UMKM masih terbatas pada penggunaan aplikasi WhatsApp, dan belum banyak yang memanfaatkan platform media sosial lain seperti Instagram atau TikTok secara optimal. Pemerintah Kalurahan juga dinilai belum melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan UMKM sehingga tidak dapat memantau hasil dari program pemberdayaan yang telah dijalankan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik pendampingan UMKM oleh pemerintah Kalurahan Guwosari. Penelitian ini juga berupaya menggali bagaimana peran

pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dapat memberikan dampak terhadap eksistensi dan kemandirian UMKM dalam rangka mewujudkan warga desa yang maju sebagaimana visi pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis ajukan adalah “Bagaimakah pendampingan pemerintah dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

C. Fokus Penelitian

Dalam Penelitian agar terarah dan sistematis dengan baik, maka peneliti akan menegaskan jangkauan dan ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan judul penelitian yang diangkat. Adapun yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian yaitu:

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintah kalurahan Guwosari dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Kalurahan Guwosari, Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Program dan kebijakan pemerintah dalam memberdayakan UMKM di Kalurahan Guwosari, Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Gowosari dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
2. Untuk mendeskripsikan Program dan kebijakan pemerintah dalam memberdayakan UMKM di Kalurahan Guwosari, Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah di Kalurahan Guwosari, Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya kajian tentang peran pemerintah kalurahan dalam pemberdayaan UMKM, khususnya melalui pendekatan sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kalurahan Guwosari dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif serta menjadi referensi bagi desa lain yang memiliki karakteristik serupa. Selain itu, penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada topik serupa.

F. Literatur Review

Pada dasarnya, penelitian tentang peran Desa dan pemberdayaan masyarakat bukanlah sesuatu yang baru. Peneliti-peneliti terdahulu berupaya mengungkap peran Pemerintah dalam mengelolah umkm diberbagai berbagaidaerah. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang berupaya mengungkap tentang pengelolahan umkm adalah sebagai berikut:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Nurahayati dan Unsul Abrar (2024) dengan judul "*Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Pinggirpapas*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek penelitian adalah Pemerintah Desa Pinggirpapas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah menjalankan perannya dalam pemberdayaan UMKM, pelaksanaannya masih belum optimal. Program-program seperti bantuan alat produksi dan sosialisasi UMKM pernah dilaksanakan, namun tidak merata dan tidak menjangkau seluruh pelaku usaha. Kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya surat izin usaha dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi juga masih rendah. Partisipasi pelaku UMKM dalam program desa tergolong minim, serta terdapat hambatan seperti rendahnya kualitas SDM dan kurangnya

pengawasan dan evaluasi dari pihak desa terhadap efektivitas program pemberdayaan (Abrar & Nurhayati, 2024).

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Wulan Sari dan Syamsul Bakhri (2022) dengan judul "*Pemberdayaan melalui Pelatihan dan Digitalisasi UMKM dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus yang dilakukan di Desa Kutosari, Kabupaten Pekalongan. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan pembuatan buket bunga, budidaya hidroponik, serta digitalisasi UMKM berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam berwirausaha. Digitalisasi dilakukan melalui pelatihan fotografi produk, pembuatan akun media sosial, serta pelatihan desain dan teknik pemasaran digital. Program ini secara nyata berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha serta membantu UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, khususnya di tengah tantangan pandemi (Sari & Bakhri, 2022).
3. Penelitian ketiga datang dari Suyatno dan Dewi Amanatun Suryani (2022) yang berjudul "*Pengembangan Potensi UMKM Berbasis Lokal dalam Mendorong Perekonomian di Desa Girikerto, Sleman*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

eksploratif yang berfokus pada pengembangan potensi lokal melalui UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi seperti pertanian (khususnya salak pondoh), peternakan kambing perah, perikanan, pangan olahan, kerajinan batik, dan pariwisata telah diberdayakan secara aktif oleh pemerintah desa bersama BUMDes dan forum UMKM. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan mitra strategis dalam pelatihan, penyediaan teknologi tepat guna, serta promosi produk. Selain itu, kolaborasi dengan akademisi dan dinas terkait juga mendorong terjadinya inovasi dalam pengembangan produk lokal. Penelitian ini menekankan pentingnya SDM yang kreatif dan inovatif serta keberlanjutan program pembinaan untuk mendukung eksistensi UMKM di desa (Suyatno & Suryani, 2022).

4. Penelitian keempat dilakukan oleh Dian Krnia Dewi, dkk tahun 2024 dengan judul *Peran Pemerintah Kalurahan Hargorejo dalam Meningkatkan Ekonomi Melalui Digitalisasi UMKM*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif di mana data dikumpul melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah Kalurahan Hargorejo berperan aktif dalam mendigitalisasi UMKM melalui program pelatihan berbasis anggaran desa, seperti pelatihan pemasaran digital dan branding "Desa Preneur". Hasilnya, literasi digital dan keterampilan pemasaran UMKM meningkat, meskipun masih ada

tantangan seperti rendahnya penguasaan teknologi informasi di kalangan pelaku UMKM. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM dan penelitian lanjutan tentang efisiensi komputerisasi UMKM (Dewi dkk., 2024).

5. Penelitian kelima berjudul *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Pengembangan UMKM Berbasis Potensi Lokal di Desa Sendangadi, Mlati, Sleman* (2025). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan Program berhasil memetakan potensi lokal seperti kerajinan tangan dan olahan pangan tradisional. Pelatihan dan pendampingan meningkatkan pendapatan UMKM sebesar 10–20%, memperkuat kemandirian ekonomi, dan melibatkan generasi muda dalam pengembangan usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan berbasis potensi lokal dan kolaborasi multi-pihak efektif dalam memberdayakan ekonomi desa (Najmudin & Sunyoto, 2025).
6. Penelitian berikut berjudul *Pendampingan UMKM dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Sajang, Kapanewon Sembalun* (2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif yang dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah survei lokasi untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan UMKM di Desa Sajang. Tahap kedua melibatkan

koordinasi intensif dengan perangkat desa serta sosialisasi program kepada masyarakat. Tahap ketiga merupakan pelaksanaan kegiatan pendampingan yang berlangsung selama dua bulan dengan melibatkan kolaborasi antara dinas perizinan, dinas koperasi, dan kelompok mahasiswa.

Hasil dari program ini menunjukkan dampak yang signifikan. Produk-produk UMKM, seperti kopi Desa Sajang, berhasil memasuki pasar minimarket dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Selain itu, pelaku UMKM mulai menyadari pentingnya legalitas izin usaha dan manfaat berkolaborasi dalam kelompok koperasi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi juga memperkuat struktur kelembagaan UMKM di tingkat desa (Hasan Quthbi dkk., 2023).

7. Penelitian ketujuh berjudul *Pendampingan Pendataan UMKM dan Pembuatan Sertifikat Keterangan Usaha di Desa Dajan Peken* (2022) ditulis oleh I Gede Suparsa, Iwayan Arik Krisna, Putu Sulistiawati Dewi, dan I Komang Sulatra. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode partisipatif dalam konteks pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu mendata pelaku UMKM di Desa Dajan Peken serta memberikan mereka legalitas dalam bentuk Sertifikat Keterangan

Usaha dari pemerintah desa. Program ini dijalankan melalui proses yang sistematis dan terstruktur, dimulai dari koordinasi dengan pihak desa, pembuatan instrumen pendataan berbasis digital, hingga penerbitan sertifikat usaha. Tim pelaksana menggunakan Google Formulir sebagai alat pengumpulan data untuk mempermudah proses pendataan. Formulir tersebut disebarluaskan ke seluruh banjar melalui perangkat desa dan media sosial resmi Kantor Desa Dajan Peken. Setelah data terkumpul, dilakukan klasifikasi berdasarkan wilayah banjar dan jenis usaha. Seluruh data kemudian diolah dalam format Microsoft Excel agar mudah dianalisis dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna informasi. Hasil pendataan menunjukkan bahwa terdapat 36 pelaku UMKM aktif yang tersebar di 9 banjar di Desa Dajan Peken. Jumlah pelaku usaha dari tiap banjar bervariasi, dengan Banjar Pasekan Baleran dan Banjar Malkangin menjadi dua wilayah dengan jumlah UMKM terbanyak, masing-masing sebanyak 8 pelaku usaha. Jenis usaha yang terdata sangat beragam, mencerminkan potensi lokal desa. Di antaranya terdapat usaha kuliner, jasa jahit, konveksi, produksi minyak, warung, peternakan ayam kampung, pembuatan tedung adat Bali, usaha otomotif, dan fashion (Suparsa dkk., 2022).

8. Penelitian kedelapan berjudul *Pendampingan Produksi UMKM dalam Meningkatkan Usaha Sale Pisang di Desa Padamulya* (2021). Penelitian ini ditulis oleh Asri Setianti dan Imam Abdul

Aziz dengan menggunakan pendekatan eksploratif-deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali secara mendalam kondisi nyata yang dihadapi pelaku UMKM serta mencari solusi praktis atas permasalahan tersebut. Data dikumpulkan melalui survei lapangan, wawancara langsung, serta kegiatan pendampingan intensif yang dilakukan secara rutin. Sumber teori yang digunakan dalam analisis berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan informasi dari internet. Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola usahanya, baik dari sisi produksi, inovasi produk, hingga manajemen keuangan. Pendampingan yang dilakukan terbukti memberikan manfaat nyata dan langsung dirasakan oleh pelaku usaha. Selain itu, kegiatan ini juga menggarisbawahi pentingnya dukungan lintas sektor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan akademisi, dalam memberdayakan sektor UMKM sebagai penopang ekonomi nasional (Seftianti & Aziz, 2021).

9. Penelitian kesembilan berjudul *Pendampingan UMKM Berbasis Produk Lokal dalam Membangun Brand yang Berkelanjutan di Desa Labuhan Sumbawa* (2025). Penelitian ini ditulis oleh Sri Rahayu, I Putu Gede Diatmika, dan Ariyansyah. Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode partisipatif dan aplikatif, dengan pendekatan yang mengutamakan keterlibatan langsung pelaku UMKM serta penerapan materi secara praktis. Proses

dimulai dengan identifikasi potensi produk lokal melalui observasi dan wawancara terhadap pelaku UMKM di Desa Labuhan, Sumbawa. Tahap awal ini bertujuan untuk memahami kebutuhan nyata dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendampingan edukatif dan aplikatif mampu menghasilkan perubahan nyata, baik dari sisi kapasitas individu maupun ekosistem usaha lokal. Dengan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, diharapkan UMKM di Desa Labuhan dapat tumbuh menjadi entitas ekonomi yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing tinggi di pasar yang semakin kompetitif (Rahayu & Diatmika, 2025).

Berdasarkan sembilan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat beragam pendekatan yang telah digunakan dalam menganalisis peran pemerintah desa dalam pemberdayaan UMKM, baik dari aspek pelatihan, digitalisasi, penguatan potensi lokal, hingga pendampingan berkelanjutan. Penelitian-penelitian tersebut menjadi dasar penting untuk memperkuat landasan teoritis dan kontekstual bagi penelitian yang sedang Anda lakukan, yaitu “Government dalam Pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.” Berikut ada persamaan penelitian relevan dengan penelitian ini:

1. Fokus pada Peran Pemerintah Desa:

Hampir seluruh penelitian terdahulu menyoroti peran pemerintah desa atau kalurahan sebagai aktor utama dalam pemberdayaan UMKM. Hal ini sejalan dengan fokus penelitian Anda yang meneliti peran government Kalurahan Guwosari sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator.

2. Penggunaan Pendekatan Kualitatif:

Seluruh penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang juga digunakan dalam penelitian Anda untuk menggali data secara mendalam dari pelaku UMKM dan aparat desa.

3. Penguatan UMKM Berbasis Potensi Lokal:

Penelitian di Girikerto, Sendangadi, dan Sajang menekankan pentingnya memetakan dan mengembangkan potensi lokal sebagai basis penguatan UMKM, yang juga tercermin di Kalurahan Guwosari yang mengembangkan produk-produk khas seperti keripik pisang dan kerajinan tangan berbasis sumber daya lokal.

4. Kendala SDM dan Digitalisasi:

Banyak penelitian, seperti di Hargorejo dan Pinggirpapas, menemukan bahwa keterbatasan SDM dan rendahnya literasi

digital menjadi hambatan utama. Hal ini juga ditemukan di Guwosari, di mana sebagian pelaku UMKM belum mampu memanfaatkan media sosial secara optimal.

Selain itu berikut dijelaskan perbedaan dan Keunikan Penelitian ini:

1. Konteks Program Dana Keistimewaan (Danais):

Penelitian ini secara khusus mengaitkan peran pemerintah kalurahan dalam pendampingan UMKM dengan pemanfaatan Danais yang menjadi ciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini belum banyak dibahas dalam penelitian lain.

2. Pendekatan Peran Pemerintah Sebagai “Government” Secara Terstruktur:

Penelitian ini menyusun analisis dengan pendekatan governmental roles secara eksplisit, yaitu sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator. Ini memberikan kerangka yang lebih sistematis dibandingkan penelitian lain yang hanya memfokuskan pada satu atau dua aspek.

3. Konteks Sosial Demografis Khusus:

Penelitian ini menyoroti kondisi spesifik Kalurahan Guwosari, seperti dominasi UMKM oleh ibu rumah tangga dan minimnya partisipasi pemuda. Ini memberikan nuansa sosial yang khas dan belum diangkat dalam penelitian sebelumnya.

4. Analisis Terhadap Monitoring dan Evaluasi:

Penelitian Anda juga menyoroti belum adanya mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap program UMKM di Guwosari, aspek yang relatif jarang dibahas secara spesifik dalam penelitian terdahulu.

G. Kerangka Teori

1. Government (Pemerintah)

Government (Pemerintah) berasal dari suku kata “perintah” (to order) yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan atau sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Jadi pemerintah adalah badan, organ, atau lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dalam suatu negara. Sedangkan pemerintahan adalah keseluruhan aktivitas (tugas, fungsi, kewenangan) yang dilaksanakan secara terorganisir oleh badan, organ atau lembaga pemerintah demi tercapainya suatu negara (Thalib, 2023).

Pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, pada umumnya pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan atau sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan

melindungi serta meningkatkan melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan yang dibuat pemerintah berdasarkan perundangundangan baik tertulis maupun tidak (Fitri & Bustanuddin, 2021). Pemerintah dalam lingkup pengertiannya dibagi dalam dua jenis yaitu:

- 1) Pemerintah dalam arti luas
Jhon Lock menegaskan dalam arti yang luas pemerintah merupakan aktivitas (tugas, fungsi dan kewenangan) yang dilaksanakan secara terorganisir oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Contoh: Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial (Budiardjo, 2007).
- 2) Pemerintah dalam arti sempit: menunjuk pada aktivitas (tugas, fungsi dan kewenangan) yang dilaksanakan secara terorganisir khusus oleh lembaga eksekutif (Adhyaksa & Akhmaddhian, 2015).

Menurut Inu Kencana Syafi'ie (2003) Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan memelihara keamanan dan memelihara derajat kehidupan rakyat serta menjamin kepentingan negara itu sendiri. Dan mempunyai fungsi Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Sedangkan

pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara (Syahputra, 2021).

Menurut Usiono (2016:124) Dilihat dari aspek kegiatan (dinamika), struktural fungsional, dan aspek tugas dan kewenangan. Kata pemerintahan setidak-tidaknya mengandung tiga pengertian, yaitu:

- 1) Ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan itu demi tercapainya tujuan negara, segala kegiatan yang terorganisasikan mengandung arti bahwa segala kegiatan yang memenuhi syarat organisasi. pengertian bersumber pada pemegang kedaulatan dalam negara, contohnya rakyat (Andriyadi, 2019). Berikutnya berlandaskan pada dasar negara berarti segala kegiatan pemerintahan dilandasi ideologi dan falsafah negara, contohnya Pancasila dan UUD 1945 di negara Indonesia.
- 2) Ditinjau dari segi struktural fungsional, pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara (Andriyadi, 2019).
- 3) Ditinjau dari segi tugas dan kewenangan negara, pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara.

Ermaya Suradinata (dalam Nawawi, 2013) mengemukakan pengertian pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

Selanjutnya Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar (Maisini, 2015). Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama, oleh karena itu, Rasyid (dalam Thahir, 2019) secara umum menerangkan tugas dan fungsi pemerintahan mencakup tujuh bidang pelayanan, sebagai berikut:

- 1) Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- 2) Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokgontokan diantara warga masyarakat.
- 3) Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.

- 4) Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintahan, atau yang lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintahan.
- 5) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
- 6) Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- 7) Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Berikutnya Pembangunan suatu bangsa dicapai melalui peningkatan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan UMKM sangat penting bagi ekonomi global, karena mereka berfungsi sebagai pilar fundamental ekonomi dunia. Saat ini, Indonesia memiliki sejumlah besar entitas bisnis di berbagai sektor, yang sangat berkontribusi pada peluang kerja dan berfungsi sebagai sarana untuk menambah pendapatan, terutama di daerah pedesaan dan untuk keluarga berpenghasilan rendah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membentuk landasan perekonomian nasional. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, UKM menyumbang 99% dari semua badan usaha, berkontribusi 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan mempekerjakan 96,9% tenaga kerja (Bakrie dkk., 2024).

Peraturan kebijakan UMKM di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Undang-undang ini mengklasifikasikan UMKM berdasarkan jenis usahanya, yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pemerintah menerapkan strategi pemberdayaan UMKM ini untuk memperkuat perekonomian dan mendorong kemajuan di berbagai daerah (Nugroho, 2008). Kebijakan pemberdayaan UMKM diuraikan dalam PP No. 7 Tahun 2021, yang berfokus pada fasilitasi, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, seperti fasilitasi, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, penyelenggaraan inkubasi, dan alokasi dana khusus untuk meningkatkan kenyamanan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UKM. Selain itu, peraturan tersebut juga mencakup ketentuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas dan dukungan bagi koperasi dan UMKM (Mustofa, 2024).

Di liat dari penjelasan diatas maka bisa di tarik kesimpulan bahwa peran pemerintah saat ini hanya sebagai fasilitator, regulator, motivator dalam penyediaan prasarana publik. Masyarakatlah sebagai pelaku utama pembangunan, dimana keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dianggap dapat mengatasi kesenjangan pembangunan yang terjadi, namun terkadang tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah tidak seiring dan sejalan dengan tujuan

yang ingin dicapai oleh masyarakat (Andreeyan, 2014). Pemerintah sebagai fasilitator dalam UMKM adalah membantu UMKM dalam berbagai aspek, seperti permodalan, pelatihan, pemasaran, dan pendampingan. Peran pemerintah sebagai regulator dalam UMKM adalah membuat dan menerapkan kebijakan dan aturan terkait. Pemerintah juga berperan dalam mengawasi keamanan produk UMKM. Pemerintah dapat berperan sebagai motivator dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memberikan penghargaan dan pembinaan berkelanjutan.

2. Pemerintah Kalurahan

Pemerintahan daerah disebutkan bahwa desa atau dengan nama lain, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Penetapan kelurahan sebagai perangkat pemerintahan daerah dibawah Kapanewon dimaksud dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan, sebagai dasar perkiraan dalam undang-undang ini adalah untuk mendorong memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat (Setiawan, 2014). Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata mengandalkan pemerintah karena peran seluruh komponen masyarakat juga mempengaruhi

keberhasilan dari suatu pembangunan, Pemerintah Desa merupakan unit pemerintah paling dasar pada hirarki yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional, yang berarti pemerintah desa merupakan organisasi yang paling depan dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena pemerintah desa langsung melayani masyarakat. Pemerintah Desa dapat juga dijelaskan sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai (Kusnendar, 2018).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Kalurahan maka Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri berkedudukan di bawah Kapanewon (Saptadi, 2019). Pengertian lainnya tentang penyebutan Kalurahan terdapat di Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan maka Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan kerja dan berperan penting dalam proses pemerataan serta peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 20, 2008, ketentuan umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Selanjutnya kinerja kerja UMKM, Menurut Mutegi, Njeru, and Ongesa (2015), kinerja UMKM merupakan hasil kerja yang diraih individu yang menyesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut pada suatu perusahaan dalam periode tertentu, yang dikaitkan dengan

sebuah ukuran nilai atau standar tertentu pada perusahaan individu tersebut bekerja. Kinerja UMKM merupakan salah satu sasaran terpentng bagi manajemen keuangan yaitu dengan memaksimalisasikan kemakuran pemilik selain memaksimumkan nilai perusahaan (Kumalasari & Asandimitra, 2019).

Menurut Hasibuan (2012) kinerja merupakan hasil dari kerja yang dicapai indvidu maupun organisasi saat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan padanya berdasarkan atas pengalaman, kecakapan, dan kesungguhan waktu (Pristiyanti, 2016). Sedangkan menurut Rivai (2005), kinera merupakan hasil atau tangka keberhasilan individu secara keseluruhan dalam periode tertentu saat melaksanakan tugas dibandingkan pada kemungkinan, seperti target, hasil kerja, sasaran atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dan disepakati bersama (Widyastuti & Rahardja, 2018). Kinerja UMKM merupakan suatu tampilan keadaan yang utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, adalah hasil maupun prestasi yang dipengaruhi atas kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja UMKM merupakan hasil kerja yang diraih secara keseluruhan serta dibandingkan pada hasil kerja, sasaran, target maupun kriteria yang telah ditetapkan didalam undang-undang.

4. Pendampingan

Pendampingan adalah salah satu proses dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melalui kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendirin (Miftahulkhair, 2018). Pendampingan UMKM selalu bertujuan untuk membina dan mengembangkan usaha. Pendampingan dalam konteks pengelolaan, pemberdayaan, dan pembimbingan dapat berbentuk berbagai macam, sebagai berikut.

a. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis adalah upaya memberikan pengetahuan melalui pelatihan untuk meningkatkan skill produksi, manajemen usaha, dan penggunaan teknologi (Barsah dkk., 2024).

b. Bantuan Modal

Pendampingan yang menyasar UMKM adalah memberikan suntikan modal guna memperdaya produksi dan pemasaran UMKM terkait. Bantuan modal merupakan upaya mendanai usaha melalui bantuan uang yang dapat dilakukan melalui pinjaman, dana hibah, dan sistem hutang-piutang lainnya.

c. Pendampingan Pemasaran

Pemasaran adalah kegiatan bisnis yang berfokus pada menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan

mereka, serta membangun hubungan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak (Firdaus, 2008). Dalam konteks pelaku usaha UMKM, kegiatan ini butuh pendampingan dari pihak lain.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan latar dan individu tersebut secara holistik (utuh), dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan (Moleong, 2007). Kajian tentang definisi-definisi tersebut dapatlah disintesiskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Dapat ditegaskan juga bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang ada, baik yang bersifat alami maupun yang dihasilkan oleh manusia. Penelitian ini mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, serta perbandingan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2017).

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi bahan perhatian penelitian kita. Sedangkan subjek penelitian adalah sesuatu dimana objek peneliti tersebut melekat atau menjadi sumber dari objek penelitian, yang biasanya dalam penelitian pendidikan berupa peserta didik, guru, kepala sekolah, orangtua siswa dan semua elemen pada pendidikan yang menghasilkan karakteristik atau sifat yang menjadi perhatian peneliti. Dalam sebuah penelitian adalah suatu keharusan untuk menentukan secara jelas objek dari penelitian tersebut agar penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah dengan baik(Moleong, 2007).

Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah Strategi pemerintah kalurahan Guwosari dalam pengelolahan usaha mikro, kecil, dan menengah

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sebagai objek atau individu yang diteliti oleh peneliti melalui observasi, membaca, atau melakukan tanya jawab terkait dengan masalah penelitian tertentu. Segala informasi atau data yang diperoleh dari sumber penelitian ini kemudian diakses dan dijadikan sebagai data. Ketika peneliti menggunakan teknik survei dan wawancara dalam pengumpulan data, sumber data dapat merujuk pada responden, yaitu individu yang memberikan jawaban dan tanggapan terhadap pertanyaan peneliti baik secara

tertulis maupun lisan (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan subjek penelitian sebagai berikut:

1. Pemerintah kalurahan Guwosari
2. Pelaku UMKM kalurahan Guwosari
3. Masyarakat daerah Guwosari
4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kalurahan Guwosari, Kec. Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

5. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi

Observasi dalam penelitian merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek, peristiwa, atau fenomena yang sedang diteliti (Sugiyono, 2022). Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengamati secara langsung perilaku, interaksi, atau kondisi yang relevan dengan topik penelitian. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti turut serta dalam situasi yang diamati, atau non-partisipatif, di mana peneliti hanya melakukan pengamatan tanpa terlibat langsung. Dalam penelitian ini, yang akan diamati adalah strategi pemerintah desa kalurahan Guwosari dalam mengelolah UMKM.

b. *Interview/Wawancara*

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi, pendapat, pengalaman, dan pandangan responden terkait topik yang sedang diteliti. Proses wawancara dapat dilakukan dengan pendekatan terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, dalam penelitian kali ini, peneliti akan melakukan wawancara secara spontan dan mengalir walaupun demikian peneliti akan tetap menyediakan daftar pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari subjek penelitian atau informan yang di wawancara (Sugiyono, 2022). Isi wawancara nantinya akan sesuai dengan fokus penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan serta analisis dokumen atau catatan yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti akan mengumpulkan dokumen berupa gambar dan dokumen lain yang dimiliki instansi terkait yang sesuai dengan topik penelitian (Moleong, 2007).

Tabel 1. 1 Tabel Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data	Kegunaan dalam analisis Skripsi	Sumber Data
Wawancara	Menggali informasi langsung mengenai peran pemerintah dalam memberdayakan, tantangan yang dihadapi pelaku usaha, serta efektivitas kebijakan yang diterapkan	1.Lurah 2.Pelaku Umkm 3.Ulu-ulu

Dokumen	Mendapatkan data sekunder untuk memperkuat analisis termasuk peraturan, kebijakan dan pemerintah yang mendukung UMKM	1. Perda 2. Dokumen program 3. Laporan kegiatan
Observasi	<ul style="list-style-type: none"> -Mengamati secara langsung kondisi pelaku UMKM, pelaksanaan program pemerintah, serta interaksi antar pemerintah dan pelaku usaha dilapangan -Melihat secara langsung pelaksanaan kebijakan dan kondisi lapangan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Apa yang diamati - Aktifitas Usaha - Fasilitas penunjang UMKM -Proses pemberdayaan keterlibatan pemerintah langsung

6. Teknik Analisis Data

Bogdan dalam Hardani, (2020) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya, sehingga informasi tersebut dapat lebih mudah dipahami dan disampaikan kepada pihak lain. Sementara itu, menurut Miles dan Huberman dalam Hardani, (2020) menerangkan analisis data melibatkan tiga kegiatan yang dilakukan secara bersamaan. Ketiga kegiatan tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan tersebut meliputi sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Dokumen analisis, wawancara mendalam, dan observasi merupakan beberapa pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi atau fakta sebagai bahan penelitian.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah komponen dari analisis data yang bertujuan untuk memperjelas, mengelompokkan, mengarahkan, menghapus data yang tidak relevan, dan mengatur data sehingga akhir dapat dihasilkan dan diverifikasi. Pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian.

3. Penyajian data

Penyajian data mencakup pengorganisasian informasi yang telah diperoleh di lapangan ke dalam bentuk matriks. Penyajian ini bisa melibatkan berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Penyajian data dilakukan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh atau mengenai bagian- bagian tertentu dari keseluruhan. Pada tahap ini, dilakukan pemilihan mengenai relevansi data terhadap tujuan penelitian. Informasi yang dikumpulkan dari lapangan dipadatkan, disusun secara lebih sistematis, dan menyoroti hal-hal penting agar lebih mudah dikelola.

4. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan ini bertujuan untuk mencari makna dari data yang telah dikumpulkan dengan cara mengidentifikasi hubungan, kesamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung, serta dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

BAB II

GAMBARAN UMUM USAHA MIKRO KECIL DAN MENGEAH (UMKM) DAN KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN

A. Sejarah Kalurahan Guwosari

Kalurahan Guwosari adalah bagian tak terpisah dari wilayah Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kalurahan ini memiliki wilayah seluas 830.0110 Ha. Secara geografis, kalurahan Guwosari berbatasan langsung dengan lima (5) Kalurahan lainnya di Kapanewon Panjang, yakni:

1. Kalurahan Bangunjiwo
2. Kalurahan Guwosari
3. Kalurahan Sedangsari
4. Kalurahan Ringinharjo
5. Kalurahan Bantul

Pada masa pemerintahan kolonial, khususnya sebelum tahun 1945, struktur pemerintahan di wilayah Yogyakarta masih sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan kolonial Belanda yang sentralistik dan elitis. Pemerintah lokal belum memiliki peran yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena kendali utama berada di tangan pemerintah kolonial. Namun, seiring dengan dinamika sosial-politik yang terjadi di Indonesia menuju masa kemerdekaan, berbagai perubahan mulai terjadi, baik dalam hal struktur pemerintahan maupun dalam pembagian wilayah administrasi di tingkat lokal.

Salah satu wilayah yang mengalami perubahan signifikan tersebut adalah Kalurahan Guwosari, yang terletak di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum terbentuknya Kalurahan Guwosari sebagaimana

dikenal saat ini, wilayah tersebut terdiri dari dua entitas administratif terpisah, yakni Kelurahan Selarong dan Kelurahan Iroyudan. Kelurahan Selarong pada masa itu dipimpin oleh Lurah Wonodiryo. Melihat dinamika yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, muncul gagasan untuk mengintegrasikan kedua kelurahan tersebut menjadi satu wilayah pemerintahan yang lebih efisien dan solid secara administratif.

Gagasan integrasi wilayah ini diprakarsai oleh Lurah Wonodiryo dari Kelurahan Selarong. Atas dasar semangat kebangsaan dan efisiensi pemerintahan, pada bulan Oktober tahun 1947 dilakukan penggabungan antara Kelurahan Selarong dan Kelurahan Iroyudan. Dari hasil integrasi tersebut terbentuklah wilayah baru yang diberi nama “Guwosari”. Penamaan “Guwosari” memiliki makna historis dan filosofis yang mendalam. Kata “Guwo” merujuk pada Goa Selarong, yaitu sebuah situs sejarah yang pernah digunakan oleh Pangeran Diponegoro sebagai tempat persembunyian dan strategi gerilya melawan penjajahan Belanda. Goa ini kini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata sejarah yang terletak di Pedukuhan Kembangputih, di sebelah utara Balai Kalurahan Guwosari. Sementara itu, kata “Sari” bermakna inti atau esensi, yang mencerminkan penyatuan dua kelurahan menjadi satu kesatuan administrative.

Dalam perkembangannya, Kalurahan Guwosari mengalami pergantian kepemimpinan secara bertahap. Lurah pertama setelah penggabungan wilayah ini adalah Sukrowardi, yang menjabat sejak tahun 1946 hingga tahun 1961. Setelah masa kepemimpinan Sukrowardi berakhir, jabatan lurah kemudian dilanjutkan oleh Ngumar yang menjabat dari tahun 1961 hingga tahun 1988. Selanjutnya, dari tahun 1988 hingga tahun 1992, kepemimpinan dijalankan oleh Budiman sebagai Penjabat Sementara Lurah. Momentum penting terjadi pada tahun 1992 ketika untuk pertama kalinya dilaksanakan pemilihan lurah secara demokratis. Dari proses pemilihan tersebut,

terpilihlah M. Daim Raharjo sebagai Lurah Guwosari yang menjabat hingga tahun 1995 Transformasi kelembagaan dan kepemimpinan ini mencerminkan proses adaptasi pemerintahan lokal terhadap perubahan sosial-politik nasional. Selain itu, hal ini juga menunjukkan adanya kesadaran kolektif masyarakat dan elit lokal dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih partisipatif, efektif, dan relevan dengan semangat kemerdekaan dan pembangunan daerah.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 2. 1 Sejarah Kepemimpinan Kalurahan Guwosari

No	Tahun	Nama Lurah	Keterangan
1	1946 – 1961	Sukrowadi	Kembang Putihan
2	1961 – 1989	Ngumar	Kembang Putihan
3	1989 – 1992	Budiman	Pejabat Sementara
4	1992 – 1995	M.Daim Raharjo	Karangber
5	1995 – 1997	Zainuri	Pejabat Sementara
6	1997 – 2000	M.Zainuri	Iroyudan
7	2000 – 2002	Drs. Abani	Pejabat Sementara
8	2002 – 2012	Abdul Basyir, S.Ag	Santan
9	2012 – 2018	H.Muh. Suharto	Iroyudan
10	2018 – 2025	Masduki Rahmad, Sip	Pringgading

Sumber: <https://guwosari.desa.id/>

B. Kondisi Geografis Kalurahan Guwosari

Peta ialah permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta wilayah adalah peta atau gambar yang mencakup wilayah atau daerah tertentu. Peta Wilayah adalah Peta yang menggambarkan ruang dalam kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek dan/atau fungsional. Peta wilayah Kalurahan Guwosari,

Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah seperti gambar di bawah ini.

Gambar 2. 1 Peta Kalurahan Guwosari



Sumber: Sistem Informasi Kalurahan Guwosari 2025

Kalurahan Guwosari memiliki total luas wilayah mencapai 830,00 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 12.745 jiwa. Secara administratif, wilayah Kalurahan Guwosari terbagi ke dalam 15 (lima belas) padukuhan, yaitu Padukuh Kembangputihan, Kentolan Lor, Kentolan Kidul, Gandekan, Dukuh, Iroyudan, Kadisono, Kembanggede, Karangber, Santan, Kalakijo, Kedung, Bungsing, Watugedung, dan Pringgading.

Berdasarkan data spasial yang ditampilkan dalam peta wilayah, dapat disimpulkan bahwa Kalurahan Guwosari memiliki cakupan wilayah yang tergolong luas. Setiap padukuhan yang ada di wilayah tersebut memiliki karakteristik dan potensi lokal yang berbeda-beda. Potensi ini, apabila dikelola secara optimal dan dikembangkan secara berkelanjutan, memiliki peluang besar untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Kalurahan Guwosari.

C. Batas Wilayah

Menurut Rustiadi dkk. (2011), batas wilayah merupakan unit geografis yang memiliki batas-batas tertentu, di mana setiap komponen di dalamnya saling berkaitan dan memiliki hubungan fungsional. Secara umum, batas wilayah berfungsi sebagai penanda pemisah antara dua wilayah geografis yang berdekatan. Dalam konteks ini, Kalurahan Guwosari merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan berbatasan langsung dengan beberapa kalurahan di sekitarnya. Adapun batas-batas wilayah Kalurahan Guwosari secara geografis adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Bangunjwo,
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Guwosari,
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Sendangsari,
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Ringinharjo dan Kalurahan Bantul.

Selain batas wilayah, orbitasi atau jarak Kalurahan Guwosari terhadap pusat-pusat pemerintahan juga menunjukkan posisi yang strategis. Kalurahan ini berjarak sekitar 6,0 km dari ibu kota Kapanewon Pajangan, 3,00 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Bantul, dan 15,00 kilometer dari ibu kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari aspek pertanahan, Kalurahan Guwosari memiliki sejumlah 113 bidang tanah yang telah bersertifikat. Sementara itu, luas tanah kas kalurahan yang dimiliki mencapai 367.812,00 hektar. Keberadaan tanah kas kalurahan ini memiliki fungsi penting dalam mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal, baik untuk kepentingan umum maupun potensi ekonomi desa.

D. Kondisi Demografi

Istilah demografi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata *demographie* yang tersusun atas dua bagian, yakni “*demos*” yang berarti penduduk dan “*graphien*” yang berarti pencatatan atau pembahasan mengenai sesuatu. Dengan demikian, secara etimologis, demografi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas atau mencatat mengenai penduduk dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu.

Secara umum, demografi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang jumlah penduduk, persebarannya di suatu wilayah, serta komposisi atau struktur demografisnya. Selain itu, demografi juga mengkaji dinamika perubahan penduduk yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), perpindahan atau migrasi, serta mobilitas sosial dalam masyarakat.

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data kependudukan Kalurahan Guwosari, tercatat jumlah penduduk laki-laki sebanyak 7.039 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 7.000 jiwa. Dengan demikian, total jumlah penduduk Kalurahan Guwosari mencapai 14.039 jiwa. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan, meskipun selisihnya tidak terlalu signifikan. Adapun rincian jumlah penduduk secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		N	%	N	%	N	%
1	Laki-laki	7039	50,14%	7039	50,14%	0	0,00%
2	Perempuan	7000	49,86%	0	0,0%	7000	49,86%

Jumlah	14039	100,00%	7039	50,14%	7000	49,86%
Belum Mengisi	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total	14039	100,00%	7039	50,14%	7000	49,86%

Sumber: Sistem Informasi Kalurahan Guwosari 2025

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Distribusi penduduk Kalurahan Guwosari berdasarkan kelompok usia menunjukkan dominasi pada kelompok usia muda, khususnya pada rentang usia 0 hingga 18 tahun. Kelompok ini merupakan bagian terbesar dari total populasi, yang mencerminkan bahwa struktur demografis saat ini masih didominasi oleh anak-anak dan remaja. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi pertumbuhan jangka panjang yang cukup besar, terutama jika didukung oleh kebijakan yang tepat di bidang pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, kelompok usia produktif, terutama pada rentang usia 25 hingga 34 tahun, juga memiliki proporsi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berada pada fase awal usia kerja, yang memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kelompok usia 25–29 tahun dan 30–34 tahun tampil lebih menonjol dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih tua, yang menandakan bahwa tenaga kerja muda masih menjadi kekuatan utama dalam struktur kependudukan saat ini.

Sementara itu, kelompok usia lanjut, yaitu usia 65 tahun ke atas, memiliki proporsi yang jauh lebih kecil dibandingkan kelompok lainnya. Meskipun belum menjadi isu dominan, kecenderungan penuaan penduduk tetap perlu diperhatikan dalam perencanaan jangka panjang. Adapun kelompok usia menengah, yakni 40 hingga 64 tahun, memiliki sebaran yang relatif merata namun tidak terlalu dominan, yang mencerminkan proses transisi menuju usia lanjut secara bertahap.

Secara keseluruhan, struktur usia penduduk Kalurahan Guwosari saat ini menunjukkan bahwa wilayah ini masih berada dalam periode bonus demografi, ditandai dengan tingginya jumlah penduduk usia muda dan usia produktif. Keadaan ini memberikan peluang besar bagi pembangunan daerah, terutama jika dimanfaatkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan pemberdayaan generasi muda secara optimal. Rincian jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		N	%	N	%	N	%
1	Dibawah 1Tahun	58	0,41%	32	0,23%	26	0,19%
2	2 s/d 4 Tahun	252	1,79%	136	0,97%	116	0,83%
3	5 s/d 9 Tahun	730	5,20%	378	2,69%	352	2,51%
4	10 s/d 14 Tahun	881	6,28%	454	3,23%	427	3,04%
5	15 s/d 19 Tahun	965	6,87%	490	3,49%	475	3,38%
6	20 s/d 24 Tahun	968	6,90%	479	3,41%	489	3,48%
7	25 s/d 29 Tahun	1013	7,22%	492	3,50%	521	3,71%
8	30 s/d 34 Tahun	1017	7,24%	495	3,53%	522	3,72%
9	35 s/d 39 Tahun	1018	7,25%	475	3,38%	543	3,87%
10	40 s/d 44 Tahun	1201	8,55%	597	4,25%	604	4,30%
11	45 s/d 49 Tahun	1167	8,31%	626	4,46%	541	3,85%
12	50 s/d 54 Tahun	1025	7,30%	529	3,77%	496	3,53%
13	55 s/d 59 Tahun	1032	7,35%	529	3,77%	503	3,58%
14	60 s/d 64 Tahun	786	5,60%	408	2,91%	378	2,69%
15	65 s/d 69 Tahun	672	4,79%	338	2,41%	334	2,38%
16	70 s/d 74 Tahun	407	2,90%	204	1,45%	203	1,45%
17	Di atas 75 Tahun	844	6,01%	376	2,68%	468	3,33%
18	0 s/d 18 Tahun	2700	1,23%	1399	9,97%	1301	9,27%
Jumlah		16736	119,21%	8437	60,10%	8299	59,11%
Belum Mengisi		-2697	-19,21%	-1398	-9,96%	-1299	-9,25%
Total		14039	100,00%	7039	50,14%	7000	49,86%

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Distribusi penduduk Kalurahan Guwosari berdasarkan jenis pekerjaan menunjukkan keragaman, meskipun terdapat beberapa kategori yang

mendominasi secara signifikan. Kelompok dengan jumlah tertinggi adalah kategori *Belum/Tidak Bekerja*, disusul oleh *Pelajar/Mahasiswa* serta *Mengurus Rumah Tangga*. Dominasi kategori ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk masih berada pada fase non-produktif, baik karena belum memasuki usia kerja, masih mengikuti jenjang pendidikan, maupun karena menjalankan aktivitas domestik.

Selain kelompok tersebut, jenis pekerjaan yang tergolong dalam sektor informal seperti *Buruh Harian Lepas*, *Petani/Pekebun*, dan *Buruh Tani/Perkebunan* juga mencatat jumlah yang cukup besar, melebihi pekerjaan dalam sektor formal seperti *Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, *Guru*, maupun *Karyawan Swasta*. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat Kalurahan Guwosari lebih banyak bergantung pada pekerjaan informal yang bersifat harian, tidak tetap, dan umumnya berbasis sumber daya lokal.

Meskipun tidak dominan, kelompok seperti *Wiraswasta*, *Pedagang*, dan *Karyawan Swasta* tetap menunjukkan eksistensi dalam struktur ketenagakerjaan, yang mencerminkan adanya dinamika ekonomi lokal yang bergerak di sektor jasa dan perdagangan kecil. Di sisi lain, jumlah tenaga kerja formal dari sektor pemerintahan tergolong rendah, yang menunjukkan keterbatasan akses atau peluang kerja di sektor publik.

Secara keseluruhan, struktur ketenagakerjaan masyarakat Kalurahan Guwosari menunjukkan bahwa dominasi masih berada pada kelompok usia non-produktif dan sektor pekerjaan informal. Kondisi ini menjadi indikator adanya tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui penguatan pendidikan, penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja agar mampu

bersaing di sektor formal. Temuan ini dapat dijadikan dasar untuk merumuskan kebijakan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas masyarakat pada level lokal maupun nasional. Rincian lebih lanjut mengenai jenis pekerjaan penduduk disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		N	%	N	%	N	%
1	Belum/Tidak Bekerja	2598	18,51%	1320	9,40%	1278	9,10%
2	Mengurus Rumah Tangga	1356	9,66%	204	1,45%	1152	8,21%
3	Pelajar/Mahasiswa	2312	16,47%	1142	8,13%	1170	8,33%
4	Pensiunan	146	1,04%	99	0,71%	47	0,33%
5	Pegawai Negeri Sipil	287	2,04%	167	1,19%	120	0,85%
6	TNI	26	0,19%	22	0,16%	4	0,03%
7	Kepolisian RI (POLRI)	51	0,36%	43	0,31%	8	0,06%
8	Perdagangan	74	0,53%	37	0,26%	37	0,26%
9	Petani/Pekebun	477	3,40%	220	1,57%	257	1,83%
10	Peternak	14	0,10%	11	0,08%	3	0,02%
11	Nelayan	4	0,03%	2	0,01%	2	0,01%
12	Industri	2	0,01%	1	0,01%	1	0,01%
13	Transportasi	5	0,04%	4	0,03%	1	0,01%
14	Karyawan Swasta	1303	9,28%	766	5,46%	537	3,83%
15	Karyawan BUMN	12	0,09%	11	0,08%	1	0,01%
16	Karyawan BUMD	9	0,06%	6	0,04%	3	0,02%
17	Karyawan Honorer	23	0,16%	17	0,12%	6	0,04%
18	Buruh Harian Lepas	3225	22,97%	1855	13,21%	1370	9,76%
19	Buruh Tani/Perkebunan	475	3,38%	252	1,79%	223	1,59%
20	Buruh Nelayan/Perikanan	1	0,01%	0	0,00%	1	0,01%
21	Buruh Peternakan	3	0,02%	3	0,02%	0	0,00%
22	Pembantu Rumah Tangga	36	0,26%	15	0,11%	21	0,15%
23	Tukang Batu	82	0,58%	36	0,26%	46	0,33%
24	Tukang Kayu	27	0,19%	17	0,12%	10	0,07%
25	Tukang Las/Pandai Besi	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
26	Tukan Jahit	9	0,06%	1	0,01%	8	0,06%
27	Penata Rias	1	0,01%	0	0,00%	1	0,01%
28	Mekanik	11	0,08%	6	0,04%	5	0,04%
29	Seniman	10	0,07%	7	0,05%	3	0,02%
30	Tabib	4	0,03%	0	0,00%	4	0,03%
31	Paraji	21	0,15%	12	0,09%	9	0,06%
32	Pendeta	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%

33	Wartawan	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
34	Dosen	11	0,08%	6	0,04%	5	0,04%
35	Guru	98	0,70%	34	0,24%	64	0,46%
36	Pengacara	3	0,02%	3	0,02%	0	0,00%
37	Konsultas	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
38	Dokter	4	0,03%	3	0,02%	1	0,01%
39	Bidan	8	0,06%	1	0,01%	7	0,05%
40	Perawat	24	0,17%	5	0,04%	19	0,14%
41	Apoteker	1	0,01%	0	0,00%	1	0,01%
42	Pelaut	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
43	Peneliti	2	0,01%	2	0,01%	0	0,00%
44	Sopir	11	0,08%	11	0,08%	0	0,00%
45	Pedagang	30	0,21%	9	0,06%	21	0,15%
46	Perangkat Desa	24	0,17%	20	0,14%	4	0,03%
47	Kepala Desa	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
48	Wiraswasta	1172	8,35%	647	4,61%	525	3,74%
49	Lainnya	29	0,21%	11	0,08%	18	0,13%
Jumlah		14027	99,9%	7034	50,10%	6993	49,81%
Belum Mengisi		12	0,09%	5	0,04%	7	0,05%
Total		14039	100%	7039	50,14%	7000	49,86%

Sumber: Sistem Informasi Kalurahan Guwosari 2025

E. Sosial Ekonomi

Dari aspek sosial dan budaya, masyarakat Kalurahan Guwosari mayoritas merupakan penduduk asli suku Jawa yang secara turun-temurun mempertahankan budaya serta tradisi leluhur. Kehidupan sehari-hari masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya Jawa, sebagaimana terlihat dari keberlangsungan berbagai kegiatan adat, pertunjukan seni tradisional, serta pelestarian situs-situs budaya yang berperan penting dalam memperkuat ikatan sosial antarwarga. Nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat, seperti semangat gotong royong, kebersamaan (guyub rukun), dan kesatuan tekad (golong gilig), terus diwariskan dan diamalkan dalam berbagai kegiatan kolektif yang mencerminkan kepedulian sosial dan kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan.

Nilai-nilai tersebut tercermin dalam pelaksanaan berbagai acara dan kegiatan yang dilakukan secara bergotong royong, baik dalam bentuk kontribusi dana, tenaga, pemikiran, maupun sumber daya lainnya. Contoh konkret dari praktik nilai-nilai sosial ini dapat ditemukan dalam penyelenggaraan acara pernikahan, kelahiran, kematian, perayaan hari besar keagamaan dan nasional, kegiatan bersih desa dan makam, serta program-program pemberdayaan masyarakat seperti pembentukan Taman Kanak-kanak PKK yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya bagi anak-anak di wilayah Guwosari.

Secara ekonomi, wilayah Kalurahan Guwosari memiliki karakteristik yang beragam dan dibagi ke dalam beberapa zona berdasarkan fungsi dan potensi unggulan masing-masing pedukuhan, yaitu:

- 1. Kawasan Pertanian**

Merupakan wilayah penyangga produksi pertanian yang mencakup Pedukuhan Gandekan, Dukuh, serta sebagian kecil dari Pedukuhan Kembanggede dan Santan. Kawasan ini berperan penting sebagai penghasil utama komoditas padi untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal Kalurahan Guwosari.

- 2. Kawasan Pusat Pemerintahan**

Terletak di Pedukuhan Iroyudan, kawasan ini merupakan lokasi Kantor Balai Kalurahan Guwosari dan menjadi pusat kegiatan pemerintahan desa.

- 3. Kawasan Kerajinan**

Meliputi beberapa pedukuhan yang memiliki produk kerajinan khas, antara lain Pedukuhan Santan yang dikenal dengan kerajinan batok kelapa, Kentolan Kidul dengan kerajinan blangkon, Watugedug dengan patung tradisional, dan Pringgading yang memproduksi batik kayu. Selain itu, Pedukuhan Kalakijo

juga mulai mengembangkan kerajinan batik sebagai sektor ekonomi kreatif baru.

4. Kawasan Wisata Kuliner Ingkung

Terdiri dari Pedukuhan Karangber (sebagai pelopor), Santan, Kalakijo, dan Kentolan Lor. Kawasan ini menjadi pusat pengembangan kuliner khas ingkung ayam, dengan jumlah warung mencapai 15 unit yang aktif berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Guwosari melalui sektor pariwisata kuliner.

5. Kawasan Peternakan

Berpusat di Pedukuhan Bungsing yang dikenal sebagai sentra peternakan ayam petelur dan ayam pedaging, memberikan kontribusi signifikan dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani dan pendapatan masyarakat setempat.

Dengan keberagaman sosial budaya dan ekonomi tersebut, Kalurahan Guwosari memiliki potensi besar dalam mengembangkan pembangunan berbasis kearifan lokal dan sektor unggulan yang dimiliki masing-masing wilayah.

F. Sarana dan Prasarana

Secara umum, istilah sarana dan prasarana mengacu pada berbagai perangkat atau fasilitas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan agar tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan definisi yang terdapat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), sarana diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu. Sementara itu, prasarana merupakan segala sesuatu yang berperan sebagai penunjang utama dalam pelaksanaan suatu proses, baik itu dalam konteks usaha, pembangunan, maupun proyek. Dalam pengertian yang lebih sederhana, sarana dapat

dipahami sebagai benda-benda yang bersifat bergerak, sedangkan prasarana merujuk pada benda-benda tidak bergerak.

Di Kalurahan Guwosari, sarana dan prasarana yang tersedia telah cukup mendukung kegiatan pariwisata di wilayah tersebut. Beberapa sarana yang menunjang sektor pariwisata antara lain adalah keberadaan pemandu wisata lokal (tour guide), penginapan atau homestay, tempat ibadah (mushola), kendaraan antar-jemput wisatawan, cagar budaya, fasilitas toilet umum, area parkir, serta aneka kuliner khas daerah, salah satunya adalah ayam ingkung, yang menjadi ikon wisata kuliner unggulan di Kalurahan Guwosari.

Selain itu, prasarana fisik seperti infrastruktur jalan juga telah memadai, mencakup jalan besar hingga jalan lingkungan (gang kecil) yang terpelihara dengan baik sehingga mampu memberikan kenyamanan dan kemudahan akses bagi wisatawan. Fasilitas pendukung lain yang tidak kalah penting adalah penunjuk arah yang terpasang di berbagai titik strategis, seperti di setiap sudut dan persimpangan jalan, yang sangat membantu wisatawan, terutama bagi mereka yang baru pertama kali mengunjungi Guwosari, dalam menemukan lokasi-lokasi tujuan wisata dengan mudah. Kehadiran sarana dan prasarana tersebut secara keseluruhan menjadi faktor penting dalam menunjang pengembangan sektor pariwisata berbasis lokal di Kalurahan Guwosari.

G. Pemerintahan Kalurahan Guwosari

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat lokal dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks Kalurahan, pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa (atau sebutan lain sesuai dengan nomenklatur daerah, seperti

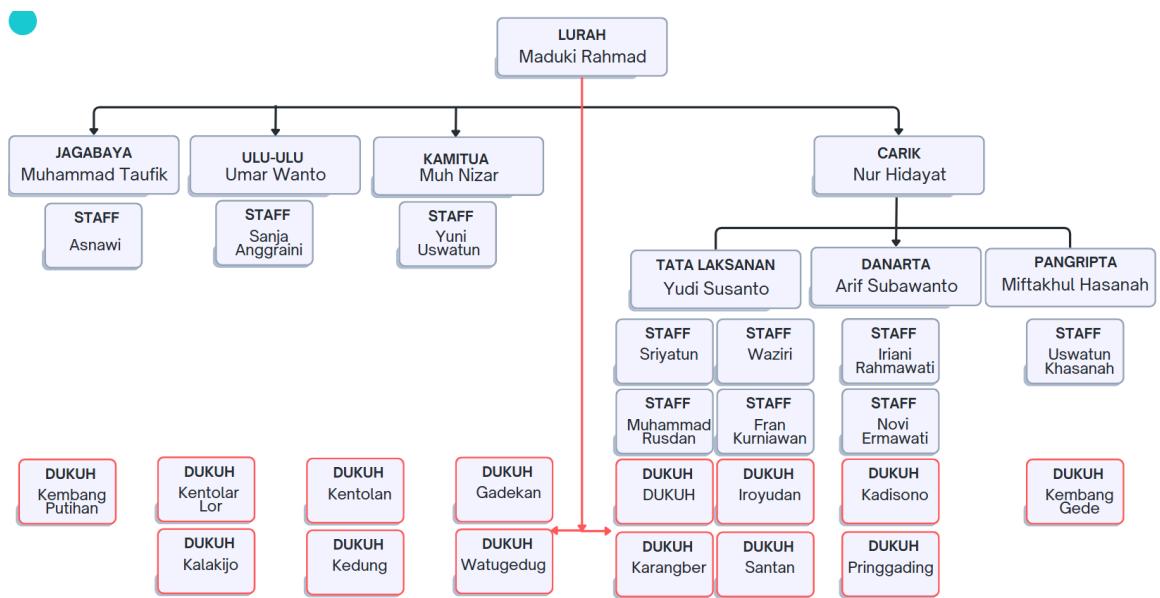
Lurah) beserta perangkat desa yang menjadi unsur pelaksana pemerintahan di tingkat desa.

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa bersama dengan perangkat desa yang membantu dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Dalam Pasal 26 undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan di tingkat desa, melakukan pembinaan terhadap masyarakat, serta memberdayakan masyarakat desa secara menyeluruh.

Susunan Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa lainnya, yang mencakup unsur sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, serta unsur kewilayahan. Komposisi perangkat ini disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Struktur organisasi pemerintahan desa pada hakikatnya merupakan representasi dari perpanjangan tangan pemerintah pusat di tingkat lokal, yang memiliki fungsi strategis dalam mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat desa. Tujuan utamanya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan partisipatif dalam rangka mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Guwosari



Sumber: Sistem Informasi Kalurahan Guwosari 2025

Kalurahan Guwosari diayomi oleh suatu lembaga Pemerintah Kalurahan yang dipimpin dan dijalankan oleh Lurah / kepala Desa bersama dengan perangkat desa lainnya. Perangkat Kalurahan Guwosari berjumlah 32 orang yang terdiri dari Pamong Desa sebanyak 17 orang dan Dukuh sebanyak 15 orang

Sedangkan menurut tingkat pendidikannya, kondisi Perangkat Kalurahan Guwosari Seperti ditunjukan pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Pemerintahan Kalurahan Berdasarkan Jabatan

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Masduki Rahmad	Laki-Laki	Lurah	Diploma IV/ Strata I
2	Nur Hidayat	Laki-Laki	Carik	Diploma IV/ Strata I
3	Muhammad Taufik	Laki-Laki	Jagabaya	SLTA / SEDERAJAT
4	Umar Wanto	Laki-Laki	Ulu-Ulu	SLTA / SEDERAJAT
5	Muh Nizar	Laki-Laki	Kamitua	Akademi/ Diploma III
6	Miftakhul Hasanah	Perempuan	Pangripta	Diploma Iv/ Strata I

7	Arif Subawanto	Laki-Laki	Danarta	Akademi/ Diploma III
8	Yudi Susanto	Laki-Laki	Tata Laksana	Diploma IV/ Strata I
9	Jumari	Laki-Laki	Staff	SLTA / SEDERAJAT
10	Asnawi	Laki-Laki	Staff	SLTA / SEDERAJAT
11	Waziri	Laki-Laki	Staff Honorer	Akademi/ Diploma III
12	Sriyatun	Perempuan	Staff	SLTA / SEDERAJAT
13	Muhammad Rusdan	Laki-Laki	Staff Honorer	SLTA / SEDERAJAT
14	Sanja Anggraini	Perempuan	Staff Honorer	SLTA / SEDERAJAT
15	Fran Kurniawan	Laki-Laki	Staff Honorer	SLTA / SEDERAJAT
16	Dewi I. Rahmawati	Perempuan	Staff	Diploma IV/ Strata I
17	Novi Ermawati	Perempuan	Staff Honorer	Diploma IV/ Strata I
18	Yuni U. Khasanah	Perempuan	Staff Honorer	Diploma IV/ Strata I
19	Uswatun Khasanah	Perempuan	Staff Honorer	Diploma IV/ Strata I
20	Sulisman	Laki-Laki	Dukuh Kembangputihan	SLTA / SEDERAJAT
21	Ahmad Khalim	Laki-Laki	Dukuh Kentolan Lor	SLTA / SEDERAJAT
22	Muhammad Fatkh.	Laki-Laki	Dukuh Kentolan Kidul	SLTA / SEDERAJAT
23	Teguh Triyanto	Laki-Laki	Dukuh Gandekan	SLTA / SEDERAJAT
24	Muhzin Tauhid	Laki-Laki	Dukuh Dukuh	SLTA / SEDERAJAT
25	Muhammad Hisyam	Laki-Laki	Dukuh Iroyudan	SLTA / SEDERAJAT
26	Imam Muttaqin	Laki-Laki	Dukuh Kadisono	SLTA / SEDERAJAT
27	Widayanto	Laki-Laki	Dukuh Kembanggede	SLTA / SEDERAJAT
28	Whewen L. Shaputra	Laki-Laki	Dukuh Karangber	Diploma IV/ Strata I
29	Rifqi Fauzi	Laki-Laki	Dukuh Santan	SLTA / SEDERAJAT
30	Riyanto	Laki-Laki	Dukuh Kalakijo	SLTA / SEDERAJAT
31	Anwar Aswahadi	Laki-Laki	Dukuh Kedung	SLTA / SEDERAJAT
32	Ichwan	Laki-Laki	Dukuh Bungsing	SLTA/SEDERAJAT
33	Mistijan	Laki-Laki	Dukuh Watugedug	SLTA/SEDERAJAT
34	Yoga Pradana	Laki-Laki	Dukuh Pringgading	Diploma IV/ Strata I

Sumber Data: Sistem Informasi Kalurahan Guwosari 2025

H. Gambaran Umum UMKM di Kalurahan Guwosari

Kalurahan Guwosari, yang terletak di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, merupakan salah satu wilayah yang turut menggeliat dalam sektor ekonomi kerakyatan melalui keberadaan dan aktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keberadaan UMKM di wilayah ini tidak hanya mencerminkan dinamika ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian integral dari struktur sosial-ekonomi desa yang terus berkembang dalam konteks pembangunan lokal.

Data yang dihimpun dalam dokumen daftar UMKM Guwosari tahun 2022 (Terlampir) menunjukkan bahwa sebanyak 328 pelaku UMKM di Kalurahan Guwosari tersebar di berbagai padukuhan dan mencakup beragam bidang usaha. UMKM di wilayah ini bergerak di sektor perdagangan, kuliner, fashion, otomotif, jasa, pertanian, peternakan, kerajinan tangan, elektronik, hingga industri pengolahan. Penyebaran jenis usaha ini menandakan adanya potensi ekonomi yang cukup beragam dan bersumber dari kekayaan sumber daya lokal serta kearifan masyarakat setempat.

Secara kuantitatif, jumlah pelaku usaha yang terdata mencapai ratusan individu (328 pelaku usaha), mencerminkan antusiasme masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, meskipun dalam skala kecil. Mayoritas dari pelaku usaha tersebut merupakan usaha mikro dengan modal dan aset yang terbatas, sesuai dengan definisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dominasi usaha mikro ini menjadikan peran pendampingan dari pemerintah, baik melalui kebijakan maupun program konkret, menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing UMKM tersebut.

Meskipun program dan dukungan telah tersedia, tantangan yang dihadapi pelaku UMKM di wilayah seperti Guwosari juga sejalan dengan temuan dalam penelitian di

Guwosari. Tantangan tersebut meliputi rendahnya literasi digital, terbatasnya akses pasar, minimnya kapasitas manajerial, serta dominasi pelaku usaha dari kalangan usia produktif menengah ke atas dengan keterlibatan generasi muda yang masih minim. Kadaan ini menuntut strategi pemberdayaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kontemporer.

Menariknya, keberagaman usaha di Kalurahan Guwosari seperti kuliner, fashion, dan kerajinan menunjukkan potensi sinergi antara ekonomi lokal dan sektor pariwisata atau ekonomi kreatif. Dengan pengelolaan yang tepat, UMKM di wilayah ini tidak hanya berkontribusi pada pendapatan keluarga, tetapi juga mampu membentuk identitas ekonomi lokal yang khas dan berkelanjutan. UMKM di Kalurahan Guwosari mencerminkan vitalitas ekonomi masyarakat desa dan memerlukan sinergi kebijakan yang berkelanjutan dari pemerintah desa, dukungan lembaga pendamping, serta partisipasi aktif masyarakat. Pembangunan berbasis UMKM bukan sekadar soal ekonomi, tetapi juga strategi sosial untuk memperkuat ketahanan komunitas dan memperluas basis kesejahteraan.

1. Unit Usaha UMKM di Kalurahan Guwosari

Pada tahun 2022, pemerintah Kalurahan Guwosari melakukan penghimpunan pelaku usaha dan unit usaha di wilayah Guwosari. Ditemukan UMKM di Guwosari didominasi oleh unit usaha perdagangan, yakni 105 unit usaha. Disusul oleh usaha kuliner sebanyak 57 Unit. Untuk lebih lengkapnya perhatikan tabel berikut.

Tabel 2. 6 Daftar Unit Usaha UMKM Kalurahan Guwosari

No	Jenis Usaha	Jumlah Unit
1	Usaha Perdagangan	105 Unit
2	Usaha Kuliner	57 Unit
3	Usaha Bidang Fashion	33 Unit
4	Usaha Bidang Otomotif	11 Unit
5	Usaha Kerajinan Tangan	26 Unit
6	Bengkel Las	7 Unit
7	Ternak Ayam Potong	1 Unit
8	Usaha Mebel	13 Unit
9	Peternakan	3 Unit
10	Jasa Laundry	2 Unit
11	Tanaman Hias	1 Unit
12	Pengrajin Genteng	1 Unit
13	Sound System	2 Unit
14	Konstruksi	1 Unit
15	Cetak Batu Bata	1 Unit
16	Servis Bedil	1 Unit
17	Jasa Bengkel	1 Unit
18	Jasa Salon	1 Unit
19	Produksi Bahan Pangan	1 Unit
20	Kuliner Dan Jasa Emping	1 Unit
21	Jual Beli Online	1 Unit
22	Usaha Bidang Pendidikan	1 Unit
23	Souvenir	1 Unit
24	Jahit Karung Beras	1 Unit
25	Jual Beli	1 Unit
26	Pembuatan Batako	1 Unit
27	Jasa Cuci Motor Dan Mobil	1 Unit
28	Ternak Ayam	1 Unit
29	Menjual Media Tanam	1 Unit
30	Jual Mainan	1 Unit

31	Jasa Potong Rambut	1 Unit
32	Pengilingan Padi	1 Unit
33	Laundry	1 Unit
34	Warung Es	1 Unit
35	Pembuat Tempe	1 Unit
36	Penjual Mainan	1 Unit
37	Toko Matrial	1 Unit
38	Industri Pengolahan	1 Unit
39	Batu Cetak	1 Unit
40	Dekor	1 Unit
41	Batik Kayu	1 Unit
42	Usaha Perikanan	1 Unit
43	Bank Sampah	1 Unit
44	Kecantikan	1 Unit
45	Kopi	1 Unit
46	Percetakan	1 Unit
Jumlah		328 Unit

Sumber: Pemerintah Kalurahan Guwosari

Data UMKM Kalurahan Guwosari di atas menunjukkan bahwa desa ini memiliki keragaman dan kekayaan ekonomi lokal yang sangat besar. UMKM berkembang di hampir semua sektor ekonomi rakyat: dari perdagangan, kuliner, fashion, hingga kerajinan dan industri rumah tangga. Hal ini mencerminkan tingginya semangat wirausaha di tingkat lokal dan peran strategis UMKM sebagai tulang punggung ekonomi desa.

Secara umum, UMKM di Guwosari didominasi oleh usaha mikro yang berskala rumah tangga dan dikelola oleh perorangan atau keluarga. Jenis usaha yang paling banyak ditemukan meliputi sektor perdagangan, kuliner, fashion, kerajinan tangan, serta usaha jasa seperti laundry, bengkel las, dan layanan kecantikan. Selain itu, terdapat pula pelaku usaha yang bergerak dalam sektor

pertanian, peternakan, mebel, serta industri pengolahan skala kecil, seperti produksi batako, batu bata, emping, dan makanan ringan. Diversifikasi sektor ini mencerminkan karakter ekonomi yang adaptif terhadap potensi sumber daya lokal maupun kebutuhan masyarakat.

2. Persebaran UMKM di Wilayah Kalurahan Guwosari

Persebaran UMKM yang merata di seluruh padukuhan seperti Dukuh, Gandekan, Iroyudan, Karangber, Kedung, Kalakijo, Pringgading, Kembanggede, hingga Watugedug menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi produktif telah mengakar di berbagai lapisan masyarakat. UMKM tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta memperkuat ketahanan ekonomi warga terhadap fluktuasi ekonomi makro. Lebih lengkapnya perhatikan tabel berikut.

Tabel 2. 7 Persebaran UMKM di Kalurahan Guwosari

No	Wilayah Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha
1	Busing	4
2	Dukuh	37
3	Gandekan	14
4	Iroyudan	23
5	Kadisono	1
6	Kalakijo	16
7	Karangber	22
8	Kedung	18
9	Kembanggede	19
10	Kembangputihan	19
11	Kentolan Kidul	31
12	Kentolan Lor	42
13	Perum Guwosari	12

14	Pringgading	45
15	Santan	9
16	Watugedung	16
Total		328 Unit

Sumber: Pemerintah Kalurahan Guwosari

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa total terdapat 328 unit usaha yang tersebar di seluruh wilayah Kalurahan Guwosari. Jumlah ini mencerminkan dinamika ekonomi masyarakat desa yang cukup aktif dan tersebar merata di berbagai padukuhan.

Padukuhan dengan jumlah unit usaha tertinggi adalah Pringgading dengan 45 unit usaha, disusul oleh Kentolan Lor (42 unit usaha), dan Dukuh (37 unit usaha). Ketiga wilayah ini dapat dianggap sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat, dengan kemungkinan adanya dukungan infrastruktur yang memadai, akses pasar yang baik, atau budaya kewirausahaan yang kuat.

Di sisi lain, terdapat padukuhan yang memiliki jumlah unit usaha paling sedikit, yaitu Kadisono dengan hanya 1 unit usaha, serta Busing dengan 4 unit usaha, dan Santan dengan 9 unit usaha. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan aktivitas ekonomi antarwilayah yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan aksesibilitas, kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, atau potensi lokal.

Padukuhan lainnya seperti Kalakijo, Watugedung, dan Iroyudan memiliki jumlah unit usaha yang tergolong menengah, berkisar antara 14 hingga 23 unit usaha, yang menunjukkan adanya potensi ekonomi yang sedang berkembang. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Kalurahan Guwosari tersebar secara relatif merata, dengan konsentrasi yang tinggi di beberapa wilayah tertentu. Informasi ini penting untuk merumuskan

kebijakan pemerataan ekonomi, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan fasilitas penunjang usaha di wilayah dengan aktivitas ekonomi yang masih rendah.

3. Pelaku usaha UMKM Guwosari Berdasarkan Jenis Kelamin

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Di Desa Guwosari, data pelaku UMKM memberikan gambaran menarik mengenai partisipasi masyarakat dalam kegiatan kewirausahaan, terutama jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan klasifikasi manual yang telah dilakukan terhadap data pelaku UMKM yang tersedia (terlampir), diketahui bahwa terdapat 186 pelaku usaha laki-laki dan 142 pelaku usaha perempuan. Fakta ini memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis kontribusi dan karakteristik kewirausahaan di desa tersebut dari perspektif gender.

Secara kuantitatif, pelaku usaha laki-laki mendominasi dengan persentase sekitar 56,7% dari total jumlah pelaku usaha yang berhasil diidentifikasi. Kecenderungan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor sosial dan budaya yang selama ini menempatkan laki-laki sebagai aktor utama dalam kegiatan ekonomi publik, terutama dalam bidang-bidang usaha yang bersifat teknis dan fisik seperti otomotif, perdagangan umum, pertanian, maupun peternakan. Selain itu, akses terhadap sumber daya produksi seperti lahan, modal, dan jaringan usaha cenderung lebih terbuka bagi laki-laki, yang turut memperkuat dominasi mereka dalam sektor ini.

Di sisi lain, kehadiran 142 pelaku usaha perempuan, atau sekitar 43,3% dari

total pelaku usaha yang diidentifikasi, mencerminkan kontribusi signifikan dari perempuan dalam pengembangan ekonomi lokal. Sebagian besar pelaku usaha perempuan cenderung bergerak dalam bidang usaha yang dekat dengan ranah domestik, seperti kuliner, kerajinan tangan, jasa rumahan, serta perdagangan eceran. Sektor-sektor ini tidak hanya relevan dengan kebutuhan lokal, tetapi juga menunjukkan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi kreatif dan pemberdayaan perempuan desa. Meski secara jumlah lebih kecil, pelaku usaha perempuan memainkan peran penting dalam ketahanan ekonomi keluarga dan masyarakat, terutama dalam kondisi sosial-ekonomi yang rentan.

Dari perspektif pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, data ini menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis gender dalam merancang kebijakan dan program pemberdayaan UMKM di tingkat desa. Perempuan perlu mendapat akses yang setara terhadap pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, modal, serta penguatan jejaring pasar agar dapat meningkatkan skala dan daya saing usaha mereka. Sementara itu, penguatan kapasitas usaha laki-laki juga tetap penting untuk menjaga keberlanjutan usaha produktif desa.

Dengan demikian, distribusi pelaku UMKM di Desa Guwosari berdasarkan jenis kelamin bukan hanya mencerminkan realitas sosial ekonomi saat ini, tetapi juga membuka ruang bagi intervensi kebijakan yang lebih adil dan efektif. Mendorong kesetaraan gender dalam pengembangan UMKM dapat menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi desa yang lebih berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini.

Tabel 2. 8 Pelaku UMKM Guwosari Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Pelaku Usaha	Bidang usaha	Jumlah	
1	Laki-Laki	Perdagangan	57 Pelaku	
		Kerajinan	21 Pelaku	
		Kuliner dan lainnya	20 Pelaku	
		Otomotif dan Mebel	13 Pelaku	
Jumlah			186 Pelaku	
2	Perempuan	Kuliner	43 Pelaku	
		Perdagangan	57 Pelaku	
		Fashion	20 Pelaku	
Jumlah			142 Pelaku	
Total			328 Pelaku	

Sumber: Olah Data Pemerintah kalurahan Guwosari

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui laki-laki paling banyak bergerak di bidang perdagangan, yang mencakup berbagai bentuk jual beli barang dan jasa. Selain itu, mereka juga cukup aktif dalam bidang kerajinan, otomotif, dan mebel, yang umumnya memerlukan keterampilan teknis atau tenaga kerja fisik. Hal ini mencerminkan preferensi laki-laki pada usaha yang lebih teknis dan mobilitas tinggi. Sementara itu Perempuan paling banyak menjalankan usaha di bidang perdagangan, sejajar dengan laki-laki, namun jenis barang dagangan bisa berbeda (misalnya kosmetik, pakaian, makanan olahan). Usaha kuliner menjadi sektor kedua yang dominan, menunjukkan kecenderungan kuat perempuan pada sektor yang bisa dikelola dari rumah atau bersifat domestik. Fashion juga menjadi pilihan signifikan, mengindikasikan peran perempuan dalam industri kreatif dan tren pasar.

BAB III

PEMERINTAH DALAM PENDAMPINGAN UMKM DI KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PANJANG, KABUPATEN BANTUL

Berdasarkan penelitian dengan studi dokumentasi, wawancara, dan observasi berikut ini dipaparkan hasil penelitian yang dibagi ke dalam tiga fokus penelitian;

A. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kalurahan dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kalurahan Guwosari

Pemerintah Kalurahan Guwosari menunjukkan keseriusan dalam pengelolaan UMKM. Hal ini tercermin dari berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah di wilayahnya. Berdasarkan hasil penelitian, peran pemerintah Kalurahan Guwosari dalam pemberdayaan UMKM dapat diklasifikasikan ke dalam tiga peran utama, yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator:

1. Peran Regulator

Sebagai lembaga pemerintahan di tingkat desa, Kalurahan Guwosari menjalankan fungsinya melalui kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan program pemberdayaan UMKM. Beberapa bentuk kebijakan tersebut antara lain:

a. Penyediaan Akses Modal

Melalui keterangan ulu-ulunya kalurahan Guwosari, Umarwanto, merangkan pihak pemerintah memberikan akses kepada masyarakat atau pelaku usaha dengan menyediakan akses terhadap permodalan. Umarwanto menerangkan pemerintah kalurahan Guwosari menyediakan beberapa kebijakan dalam mempermudah masyarakat mendapat akses modal. Adapun kebijakan-kebijakan itu terwujud dalam bentuk kerjasama dengan penyedia modal, yang di antaranya adalah;

1) BUMKALMA (BUMKal Bersama)

BUMKal (Badan Usaha Milik Kalurahan) kalurahan Guwosari menyediakan program simpan pinjam melalui unit BUMKALMA untuk masyarakat yang sedang dalam membangun bisnis atau usaha. Sasaran utama program ini adalah pelaku usahan UMKM. Hal ini ditegaskan oleh Ulu-ulunya Kalurahan Guwosari, Umarwanto.

Masyarakat dapat mendapatkan modal usaha di bumkalma melalui sistem simpan pinjam. Mirip koperasi. Sasaran dari unit ini adalah masyarakat yang sedang dalam membangun usaha. (Wawancara, 8 Mei 2025)

Lebih lanjut, Umarwanto menerangkan bahwa upaya pemerintah dalam mempermudah akses modal merupakan salah satu peran penting pemerintah dalam hal kebijakan yang membantu masyarakat, terlebih khusus para pelaku UMKM.

Akses modal merupakan suatu upaya yang diprakarsai oleh pemerintah kalurahan Guwosari dengan tujuan membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Upaya ini dibarengi dengan upaya upaya yang lainnya.

2) Pinjaman BANK Terkait

Selain BUMKal, pemerintah juga menyediakan jalur mandiri dalam pemodalan yakni, akses pinjaman di Bank, seperti bank BPD dan BRI. Pinjaman yang dimaksudkan tentu melalui jalur pemerintah kalurahan untuk mempermudah proses pinjaman. Umarwanto menerangkan sebagai berikut.

Kami bekerja sama dengan beberapa bank untuk membantu masyarakat untuk modal usahanya. Misal, melalui bank, masyarakat dapat pinjam dengan bantuan pihak kalurahan untuk usaha. (Wawancara, 8 Mei 2025)

Dengan tersedianya jalur pinjaman bank melalui pertolongan pihak kalurahan, masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah untuk mengembangkan usahanya.

b. Pelatihan dan Pengembangan Keahlian

Pelatihan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan keterampilan akan suatu bidang. Dalam hal ini pemerintah Kalurahan Guwosari melalui program pelatihan UMKM berharap para pelaku usaha terlibat aktif dan mendapatkan manfaatnya berupa peningkatan *skill* atau keterampilan guna mengembangkan usaha yang sedang dibangun.

Kami bekerjasama dengan beberapa pihak, seperti Satu Asa (Lembaga Pelatihan). Kami datangkan mereka untuk membantu pelaku UMKM dalam membangun bisnisnya. (Wawancara 21, Mei 2025)

Kutipan wawancara bersama staf Ulu-ulu, Sanja Anggraini di atas menegaskan bahwa pemerintah kalurahan menggandeng *stakeholder* dalam program pelatihan. Lebih lanjut, Anggraini menegaskan bahwa pelatihan ini berisi tentang *marketing*, *labeling*, dan pengemasan. Pihak yang menjadi pemateri pun diambil dari konsultan usaha swasta seperti Satu Asa.

c. Kegiatan Promosi dan Pemasaran

Kebijakan ini menguntungkan pihak UMKM di Guwosari. Wujud dari kegiatan ini adalah antara lain bazar, pameran UMKM, dan kunjungan UMKM. Sanja Anggraini, menerangkan bahwa setiap acara besar yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan, akan selalu melibatkan pelaku usaha UMKM. Salah satu kegiatan yang disoroti Anggraini adalah Festival UMKM Kalurahan. Kegiatan ini terakhir kali diselenggarakan pada bulan tahun 2024. Upaya ini dimaksudkan agar usaha-usaha yang sedang dirintis oleh masyarakat Guwosari dapat dikenal oleh banyak orang, termasuk wisatawan.

Kami juga melakukan promosi dengan melakukan kunjungan ke desa yang lain untuk mengenalkan usaha-usahan yang kami miliki di sini (kalurahan Guwosari). Salah satunya tahun kemarin (2024) kami lakukan kunjungan ke Sriharjo, Imogiri. (Wawancara, 21 Mei 2025)

Berdasarkan keterangan Anggraini, bahwa kegiatan promosi rutin dilakukan oleh pemerintah kalurahan melalui kebijakan yang ada. Upaya ini menegaskan posisi pemerintah sebagai penyedia fasilitas.

Namun, efektivitas peran regulator ini masih dihadapkan pada sejumlah hambatan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola jumlah UMKM yang cukup besar, yakni mencapai 328 unit usaha. Hal ini disampaikan oleh Ulu-uluh Kalurahan dan stafnya yang mengakui bahwa pengelolaan masih belum maksimal karena keterbatasan tenaga pengurus. Selain itu, lemahnya koordinasi informasi menyebabkan banyak pelaku UMKM tidak mengetahui adanya program pemberdayaan, sehingga tidak semua pelaku terjangkau oleh kebijakan yang ada.

Ulu-uluh Kalurahan, Sumarwanto, menyadari bahwa sumber daya pemerintah Kalurahan tidak cukup untuk mengurus sebanyak 328 UMKM yang tersebar di Kalurahan Guwosari. Hal ini juga dipertegas oleh Anggraini, selaku staf ulu-uluh

Ada sebanyak 328 UMKM di Kalurahan Guwosari. Data tahun 2022 ya, tapi setiap waktu selalu berubah. Kesulitan sih untuk mengurus sebanyak itu. Apalagi yang ursu bagian itu kan cuma Ulu-ulu. (Wwancara, 21 Mei 2025)

Sumber daya dalam konteks ini adalah tenaga pengurus UMKM di Kalurahan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakefisien pengelolaan atau penataan pelaku usaha UMKM. Kekurangan sumber daya inilah yang akan melemahkan sistem kordinasi.

2. Peran Dinamisator

Peran dinamisator adalah upaya pemerintah dalam memberi dorongan kepada masyarakatnya untuk aktif dan terlibat dalam program pembangunan, salah satunya program pengembangan dan pembangunan UMKM. Pemerintah Kalurahan Guwosari turut serius dalam perannya ini sebagai pemberi motivasi kepada pelaku usaha UMKM Guwosari. Peran dinamisator di kelurahan Guwosari dalam konteks pengembangan UMKM terwujud dalam bentuk komunikasi pemerintah desa terhadap masyarakat atau pelaku usaha UMKM.

Komunikasi formal merupakan bentuk komunikasi antara pihak lembaga dan pihak lainnya baik itu terhadap lembaga yang lain atau pun terhadap masyarakat. Wujud komunikasi ini biasanya melalui surat menyurat atau pengumuman resmi, baik melalui broadcast ataupun website pemerintah Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Guwosari dalam hal ini adalah penyuluhan dan sosialisasi. Ulu-ulu Kalurahan Guwosari, Umarwanto, menegaskan bahwa pemerintah kalurahan berupaya membangun komunikasi yang baik terhadap masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan.

Kami mendatangkan ahli pada bidang bisnis untuk bersosialisasi. Agenda ini rutin dilakukan. Dalam mengajak masyarakat, kami menyebarkan undangan melalui dusun yang kemudian diteruskan ke RW dan RT. (Wawancara, 8 Mei 2025)

a. Penyuluhan

Upaya penyuluhan dalam memberdayakan pelaku UMKM biasanya dilakukan oleh para pendamping dari kalurahan yang dipimpin oleh kepala Ulu-ul. Penyuluhan ini merupakan bagian dari program pemberdayaan UMKM. Agenda penyuluhan biasa dilakukan pada saat pertemuan Desa Preneur yang diselenggarakan satu kali dalam satu bulan.

b. Sosialisasi

Seperti yang dijelaskan sebelumnya sosialisasi biasa dilakukan pada saat program pelatihan. Sosialisasi ini diselenggarakan sebanyak 4 kali dalam satu tahun dan bekerja sama dengan ahli pada bidang UMKM baik dari pemerintah maupun dari lembaga swasta. Salah satunya adalah lembaga konsultan bisnis Satu Asa. Lembaga ini telah menjadi partner kalurahan Guwosari dalam memberikan sosialisasi UMKM di kalurahan.

3. Peran Fasilitator

Dalam upaya meningkatkan kreatifitas dan pendapatan pelaku usaha UMKM, pemerintah kalurahan Guwosari memberikan dirinya sebagai fasilitator. Dalam hal ini, pemerintah cukup serius mendampingi pelaku usaha UMKM dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua macam fasilitas yang diberikan pemerintah kalurahan Guwosari, yakni fasilitas infrastruktur dan fasilitas edukasi.

a. Fasilitas Infrastruktur

Fasilitas infrastruktur merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kalurahan Guwosari kepada masyarakat dengan maksud memberikan bantuan kepada masyarakat untuk dapat mempergunakan fasilitas tersebut guna mengembangkan bisnis dan akses lainnya yang membantu menyejahterahkan

masyarakat. Pada konteks pemberdayaan UMKM setidaknya ada dua macam fasilitas infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah, yakni infrastruktur umum dan infrastruktur khusus.

1) Infrastruktur Umum

Infrastruktur umum adalah fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah kalurahan guna menopang usaha masyarakat. Infrastruktur ini dapat ditemui di tempat umum di Guwosari, seperti lapak penjualan, pasar, emperan yang dapat digunakan untuk jualan, lapangan, dan lain sebagainya. Fasilitas-fasilitas tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat baik itu yang sifatnya refresing atau bisnis. Dalam konteks ini tujuan utamanya adalah bisnis masyarakat.

2) Infrastruktur Khusus

Fasilitas infrastruktur khusus adalah fasilitas yang dipergunakan untuk kepentingan tertentu. Pada konteks ini adalah kepentingan pemberdayaan UMKM. Infrastruktur khusus ini dapat berupa perbantuan usaha. Berdasarkan keterangan staf Ulu-ulu kalurahan Guwosari, Anggraini infrastruktur khusus ini dapat berupa rak jualan, kontainer box, dan tapklak meja.

Dalam satu tahun anggaran, dana untuk pemberdayaan UMKM dapat berwujud seperti rak jualan, tapplak meja, dan container box. Setiap tahun fasilitas ini berbeda-beda, tergantung kebutuhan pelaku UMKM. (Wawancara, 21 Mei 2025)

Berdasarkan keterangan itu, dapat dipastikan bahwa infrastruktur khusus yang dimaksudkan oleh pemerintah kalurahan adalah fasilitas yang diberikan kepada pelaku UMKM setiap tahun yang wujudnya dapat berbeda-beda. Adapun fungsi dan tujuan fasilitas ini sebesar-besarnya untuk membantu pelaku UMKM berjualan.

Gambar 3. 1 Countainer Box



Gambar 3. 2 Rak Penjualan



Sumber Foto: Dokumentasi Kalurahan Guwosari

b. Fasilitas Edukasi

Seperti pada penjelasan sebelumnya, fasilitas edukasi ini berupa program yang disediakan oleh pemerintah kalurahan dalam memberdayakan UMKM. Program-program tersebut dapat berupa penyuluhan dari pihak swasta dalam memberdayakan UMKM. Berdasarkan keterangan, beberapa aktivitas edukasi telah diselenggarakan seperti, kunjungan UMKM, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan. Fasilitas edukasi juga dapat berupa program simpan pinjam dan program pemodalank lainnya.

Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi dinamisator dan fasilitator ini juga menemui hambatan. Salah satunya adalah rendahnya partisipasi pelaku UMKM dalam program yang ada, baik karena kurangnya motivasi internal maupun keterbatasan literasi digital. Selain itu, meskipun akses permodalan tersedia, pelaku UMKM tetap merasa kesulitan dalam memperoleh pinjaman karena prosedur atau keterbatasan jaminan. Walaupun telah tersedia banyak pos atau unit simpan pinjam, Sumarwanto merasa belum cukup bagi masyarakat dalam soal permodalan.

Makanya mungkin banyak juga UMKM yang enggak lama, langsung bubar. Dan hampir setiap waktu. Anggaran yang disediakan bukan dalam bentuk uang tapi fasilitas. Kalau mau uang mereka harus pinjam. Belum tentu untung. (Wawancara, 8 Mei 2025)

Permodalan yang dimaksudkan adalah soal bagaimana para pelaku UMKM kesulitan mendapatkan modal. Walaupun sudah diperbantukan oleh unit-unit simpan pinjam milik Kalurahan Guwosari. Rendahnya adaptasi terhadap teknologi dan pemasaran digital juga menjadi tantangan, yang semakin menegaskan perlunya pelatihan berkelanjutan.

Dengan demikian, kendala-kendala tersebut tidak hanya menjadi hambatan teknis, tetapi juga mencerminkan pentingnya peningkatan kualitas pendampingan, penyuluhan, serta sistem informasi dan monitoring oleh pemerintah kalurahan.

B. Program dan Kebijakan Pemerintah Kalurahan Guwosari dalam Memberdayakan UMKM

Pemerintah kalurahan Guwosari mempersiapkan program yang membantu pelaku usaha UMKM berkembang dan sejahtera. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2022 terdapat 328 UMKM yang beroperasi di Kalurahan Guwosari (terlampir). Berdasarkan keterangan Anggraini, staf Ulu-ulu. Angka 328 itu terbilang statis. Artinya setiap waktu tetap ada perubahan tergantung kinerja UMKM itu sendiri. Angka tersebut memungkinkan pemerintah memberi perhatian khusus kepada UMKM melalui program khusu dan upaya khusus juga. Berikut ini dipaparkan program yang diprakarsai pemerintah Kalurahan Guwosari guna memberdayakan UMKM di kalurahan Guwosari.

1. Program Desa Preneur

Program Desa Preneur berdiri sejak tahun 2021. Motivasi di balik berdirinya program ini adalah adanya kemunduruan wirausaha di kalurahan guwosari akibat

pandemi *covid-19*. Maka ide memunculkan program ini didorong oleh keinginan pemerintah kalurahan menjadikan kalurahan Guwosari sebagai kalurahan yang sejahtera secara bisnis. Berdasarkan data yang diperoleh, dari 328 UMKM yang berada di kalurahan Guwosari, 78 di antaranya tergabung secara aktif di dalam Desa Preneur. Keterangan dari Ulu-ulu, Umarwanto mepertegas keberadaan Desa Preneur.

Kami memiliki program untuk pemberdayaan UMKM, salah satunya adalah Desa Preneur. Program ini nantinya membantu UMKM untuk saling interaksi dan supaya kami mudah menjangkau mereka. (Wawancara, 8 Mei 2025)

Kegiatan Desa Preneur dapat dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan umum bersama pemerintah kalurahan, dan kegiatan mandiri.

a. Kegiatan Umum

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diagendakan oleh pemerintah Kalurahan. Seperti pada keterangan sebelumnya kegiatan ini terdiri dari penyuluhan, sosialisasi, dan kunjungan. Berikut keterangan lebih lanjut dari Umarwanto.

Program Desa Preneur biasa dilaksanakan di GOR kalurahan. Itu nanti isinya edukasi soal marketing atau promosi, pengemasan, dan lain sebagainya. Kami mengajak pihak lain sebagai pemateri pada kegiatan ini. (Wawancara, 8 Mei 2025)

Salah satu yang menjadi *stakeholder* yang diajak oleh pihak kalurahan adalah Satu Asa. Lembaga ini bersedia menjadi pemateri untuk kegiatan pemberdayaan UMKM di Kalurahan Guwosari. Berikut ini beberapa foto kegiatan Satu Asa yang diselenggarakan di kalurahan Guwosari.

Gambar 3. 3. Kegiatan Desa Preneur Bersama Satu Asa, Agustus 2024



Sumber: Dokumentasi Kalurahan Guwosari

Berdasarkan keterangan dari Umarwanto, Ulu-ulu Kalurahan Guwosari, kegiatan ini bertujuan mendidik masyarakat yang memiliki usaha UMKM untuk lebih terampil dalam berbisnis. Dalam hal ini pemerintah menggandeng Satu Asa sebagai lembaga konsultas bisnis untuk membagi ilmunya kepada masyarakat Guwosari.

Selain kegiatan formal seperti di atas, kegiatan kunjungan juga menjadi salah satu program Desa Preneur. Kegiatan kunjungan ini beragendakan mempelajari sistem dan materi UMKM pada tempat lain dan menunjukkan UMKM pada desa sendiri. Salah satu kegiatan kunjungan ini pernah dilaksanakan yaitu berkunjung ke Kalurahan Sriharjo, Imogiri. Perhatikan gambar berikut.

Gambar 3. 4 Kunjungan Desa Preneur ke Kalurahan Sriharjo, Mei 2024



Sumber: Dokumentasi Kalurahan Guwoharjo

Ketua Desa Preneur, Sumaryadi menerangkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membangun silahturahmi dan saling belajar.

Kami sebagai pelaku UMKM juga dapat memberikan apa yang kami punya (ilmu wirausaha) ke orang lain, begitu pun sebaliknya. (Wawancara, 21 Mei 2025)

Lebih lanjut, Sumaryadi juga menegaskan bahwa kegiatan Desa Preneur tidak hanya terkait dengan kunjungan saja, melainkan juga adalah pembekalan, seperti pembekalan terhadap mahasiswa KKN atau mahasiswa yang datang belajar di Desa Preneur.

b. Kegiatan Mandiri

Kegiatan mandiri diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pengurus Desa Preneur saja. Dalam hal ini, pihak pemerintah Kalurahan Guwosari tidak terlibat seperti pada kegiatan umum. Berdasarkan keterangan Sumaryadi, Ketua Desa Preneur, kegiatan Desa Preneur terdiri dari, kegiatan rutin bulanan. Kegiatan rutin bulanan ini adalah pertemuan satu kali satu bulan guna membahas strategi dan kerja kelompok.

Kegiatan rutin satu bulan satu kali ini nantinya adalah membahas apa saja yang berkaitan dengan UMKM. Walaupun setiap bulannya tidak banyak yang ikut, tetapi semua terlibat (berkegiatan yang berkaitan dengan Desa Preneur). (Wawancara, 21 Mei 2025)

2. Program Pendukung

Program pendukung merupakan program yang dalam kegiatannya memberikan manfaat kepada pelaku usaha UMKM. Program ini diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan Guwosari yang sebesar-besarnya untuk kepentingan UMKM di Kalurahan Guwosati. Program-program ini sebelumnya telah disebutkan pada pembahasan peran pemerintah. Namun lebih rinci dijelaskan berikut ini.

a. *Event Kalurahan*

Program ini biasanya dilaksanakan di GOR (Gedung Olaraga) Kalurahan.

Program ini merupakan program rutin dari kalurahan. Berikut keterangan Ulu-ulu Kalurahan Guwosari, Umawanto.

Pada event kalurahan, kami memberikan kesempatan kepada UMKM untuk datang memajangkan dagangannya atau usahanya untuk dipromosikan. Ini sangat berguna bagi UMKM. Kegiatan festival ini diselenggarakan oleh Kalurahan. (Wawancara, 8 Mei 2024)

Program ini menjadi ajang promosi bagi UMKM dan juga menjadi ajang kreatifitas yang dimiliki oleh para pelaku usaha di Kalurahan Guwosari. Pada kegiatan ini pemerintah berusaha melibatkan segala jenis bidang usaha yang dimiliki oleh para pelaku UMKM di wilayah kalurahan Guwosari.

b. BUMKALMA (Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama)

Salah satu unit yang dimiliki oleh BUMKal Guwosari adalah unit Bumkalma. Unit ini menyediakan koperasi simpan pinjam, yang diperuntukan bagi para pelaku UMKM di Kalurahan Guwosari. Masyarakat dapat dengan mudah meminjam modal dari unit ini untuk keperluan usaha. Berdirinya Bumkalma ini juga untuk mendapat keuntungan bagi kas kalurahan yang nantinya dipergunakan untuk keperluan lain.

c. DEMAPAN (Desa Mandiri Pangan)

Demapan adalah salah satu program unit pinjaman milik Kalurahan Guwosari. Program ini diperuntukan bagi seluruh masyarakat Guwosari yang membuthkan dana. Tentu sasaran dari program ini adalah para pengusaha kecil dan petani.

d. PUAB

PUAB adalah unit simpan pinjam yang menasari para petani di Kalurahan Guwosari. Unit ini bersedia memfasilitasi para petani dalam usahanya. Berdasarkan keterangan Ulu-uluh, Sumarwanto menegaskan unit ini diperuntukan bagi para petani, yakni petani sawah, sayuran, dan buah-buahan yang sedang dalam mengembangkan bisnisnya.

Jumlah UMKM yang begitu banyak menjadi tantangan sendiri bagi pelaku UMKM itu sendiri. Selain itu, kondisi lainnya juga, seperti daya beli, perubahan aturan, dan masalah modal. Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara, ditemukan beberapa kendala atau penghambat yang datang dari UMKM dalam upaya pemberdayaan UMKM di Kalurahan Guwosari.

a. Komunikasi dari Pemerintah

Beberapa UMKM tidak mengetahui adanya program pemerintah pemberdayaan UMKM. Hal ini disebabkan oleh jalur kordinasi yang tidak begitu jelas dan tidak tepat sasaran. Salah satu pelaku usaha UMKM toko sembako, Dwi Astuti pemilik toko Warung Raisa mengaku tidak terlibat dalam beberapa kegiatan pemberdayaan UMKM yang diselenggarakan oleh Kalurahan Guwosari.

Kami tidak tahu kalau ada yang namanya Desa Preneur, Mas. Kami juga tidak pernah mendapat bantuan apa-apa. Enggak ada undangan juga kalau ada kegiatan gitu-gitu. Mungkin pas kami lagi sibuk kali yak. (Wawancara 21, Mei 2025)

Selain itu, salah satu usaha milik mebel kayu, Bernama Subur berkah juga mengaku tidak mengetahui Desa Preneur. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi yang tidak tepat arah. Hal ini dapat disebabkan oleh dua

hal; jumlah UMKM yang banyak dan metode pendataan UMKM yang tidak tepat sasaran.

b. Kurangnya inovasi dan adaptasi teknologi

Di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi, sebagian besar UMKM di Kalurahan Guwosari belum mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Rendahnya penggunaan teknologi digital, baik dalam pemasaran maupun operasional usaha, menghambat daya saing UMKM di pasar yang semakin kompetitif. Kurangnya pelatihan teknologi terapan serta keterbatasan fasilitas penunjang digitalisasi menjadi faktor pendukung lemahnya inovasi dan adaptasi.

C. Pembahasan

1. Aturan dan Fungsi Mengatur (Regulator)

Pemerintah Kalurahan Guwosari menjalankan fungsi mengatur melalui penyusunan peraturan kalurahan (Perkal) dan keputusan lurah yang menjadi dasar legal dalam pengelolaan UMKM. Aturan-aturan tersebut mencerminkan kekuasaan normatif pemerintah dalam menentukan batas-batas legal kegiatan ekonomi di tingkat desa. Fungsi ini terwujud dalam upaya penataan zonasi usaha, legalisasi kegiatan usaha, serta pemberlakuan kebijakan prioritas pembangunan desa yang menyentuh sektor ekonomi lokal.

Namun demikian, efektivitas peraturan tersebut seringkali terbatas oleh kurangnya sosialisasi dan rendahnya kepatuhan pelaku UMKM terhadap regulasi yang ditetapkan. Ini menunjukkan adanya jarak antara kekuasaan formal (aturan tertulis) dengan kekuasaan substantif (pengaruh nyata di

masyarakat), yang perlu dijembatani melalui pendekatan partisipatif dan edukatif.

2. Kebijakan dan Fungsi Mengurus (Administratif/Dinamisator)

Fungsi pemerintah sebagai dinamisator tercermin dalam kebijakan-kebijakan strategis dan operasional yang bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan UMKM. Kebijakan ini mencakup pengalokasian anggaran dari Dana Desa untuk pelatihan, pemberian bantuan alat produksi, hingga fasilitasi kerja sama antar pelaku usaha.

Dalam hal ini, kekuasaan administratif digunakan untuk mengurus dan mengelola sumber daya desa guna mendorong pertumbuhan UMKM. Namun, pelaksanaannya masih dihadapkan pada kendala teknis seperti keterbatasan data pelaku UMKM, kapasitas aparatur, serta kesinambungan program. Artinya, fungsi mengurus yang dijalankan berdasarkan kebijakan belum sepenuhnya mampu mengatasi kompleksitas kebutuhan pelaku usaha yang sangat beragam.

3. Kebijakan Pelayanan dan Fungsi Melayani (Fasilitator)

Sebagai fasilitator, pemerintah Kalurahan Guwosari memberikan layanan berupa pendampingan, pelatihan kewirausahaan, dan penghubung dengan pihak eksternal (seperti dinas, koperasi, atau pasar digital). Di sinilah fungsi melayani masyarakat terlihat paling nyata, dengan orientasi pada pemberdayaan dan pemenuhan hak ekonomi warga.

Namun, fungsi pelayanan ini masih dibatasi oleh keterbatasan infrastruktur, SDM, dan sinergi antar aktor. Pemerintah kalurahan belum sepenuhnya mampu menciptakan sistem layanan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan UMKM yang terus berkembang. Meskipun memiliki

kekuasaan pelayanan, pemerintah desa masih membutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kualitas layanannya.

4. Kekuasaan dan Fungsi Mengatur dan Mengurus

Pemerintah Kalurahan Guwosari memiliki kuasa untuk mengatur dan mengurus UMKM di wilayahnya. Kekuasaan ini merupakan tanggung jawab yang diemban dalam urusan kewirausahaan. Melalui kekuasaan fungsi mengatur dan mengurus dapat dijalankan guna mencapai tujuan pemerintah, dalam hal ini adalah menyejahterakan maryakat Kalurahan Guwosari. Pada penelitian ini pun kekuasaan itu telah ditunjukkan oleh pemerintah Kalurahan melalui penerbitan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan lainnya yang mendukung keberlangsungan perkonomian UMKM di kalurahan Guwosari.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai peran pemerintah Kalurahan Guwosari dalam pengelolaan UMKM, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah menjalankan fungsi-fungsi pemerintah (*government*) secara aktif melalui regulasi, dinamisasi, dan fasilitasi. Sebagai regulator, pemerintah kalurahan membentuk kebijakan yang mendorong kemudahan akses permodalan melalui BUMKALMA dan kerja sama dengan perbankan, serta menyelenggarakan pelatihan dan promosi untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem usaha yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Dalam perannya sebagai dinamisator, pemerintah Kalurahan Guwosari tidak hanya mengandalkan kebijakan formal, tetapi juga membangun interaksi langsung dengan masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi, dan program Desa Preneur. Upaya ini bertujuan untuk memotivasi pelaku UMKM agar lebih terlibat dalam pembangunan ekonomi lokal. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan jangkauan komunikasi, sehingga sebagian UMKM belum merasakan manfaat program tersebut.

Sementara itu, sebagai fasilitator, pemerintah berupaya menyediakan sarana fisik (seperti infrastruktur jualan) dan non-fisik (pelatihan, pendampingan) untuk memperkuat daya saing UMKM. Namun, kendala seperti terbatasnya sumber daya manusia di tingkat kalurahan dan ketidakmerataan distribusi bantuan menunjukkan bahwa fungsi fasilitasi ini belum sepenuhnya optimal. Tindak pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Kalurahan Guwosari telah berjalan dengan pendekatan multidimensi, meskipun masih dihadapkan pada tantangan koordinasi, kapasitas kelembagaan, dan kesinambungan program.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan UMKM di Kalurahan Guwosari, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kalurahan Guwosari

a) Meningkatkan Koordinasi dan Sosialisasi:

Memperbaiki sistem komunikasi dengan pelaku UMKM, misalnya melalui pendataan ulang yang lebih akurat dan penggunaan media digital (WhatsApp grup, website) untuk menyebarkan informasi program.

b) Penguatan Kapasitas SDM:

Menambah staf khusus yang menangani UMKM atau melibatkan relawan/pemuda karang taruna untuk membantu pendampingan.

c) Diversifikasi Sumber Modal:

Memperluas kerja sama dengan perbankan, investor lokal, atau program kementerian untuk meningkatkan akses permodalan dengan bunga rendah.

2. Bagi Pelaku UMKM

a) Aktif dalam Program Pemerintah:

Manfaatkan pelatihan, pendampingan, dan fasilitas yang disediakan untuk meningkatkan kompetensi bisnis.

b) Membangun Jaringan Usaha:

Membentuk komunitas UMKM mandiri untuk saling berbagi informasi, strategi pemasaran, dan sumber daya.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian tentang government pemerintah kepada UMKM perlu kajian mendalam tentang dampak spesifik program Desa Preneur terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Penelitian bisa diperluas dengan menganalisis peran stakeholder lain (swasta, akademisi) dalam penguatan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, U., & Nurhayati. (2024). Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Pinggirpapas. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 10, 152–160.
- Adhyaksa, G., & Akhmaddhian, S. (2015). *Pengelolaan Dana Otonomi Berdasarkan Undang-Undang Daerah Istimewa Porvinsi Acen dan Undang-Undang Otomoi Khusus Provinsi Papua*.
- Andriyadi, F. (2019). Good Governance Government and Goverment. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2).
- Bakrie, R. R., Suri, S. A., Nabilah, Sahara, A., Pratama, V. H., & Firmansyah. (2024). Pengaruh Kreativitas UMKM Serta Kontribusinya di Era Digitalisasi Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(2), 82–88. <https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.308>
- Barsah, A., Salami, M. M., & Sutoro, M. (2024). Meningkatkan Kualitas SDM UMKM Desa Cicalengka, Kapanewon Pagedangan, Kabupaten Tangerang Melalui Pelatihan Manajemen Kinerja dan Produktivitas. *Jurnal Amanah Mengabdi*, 1(Desember), 188–192. Diambil dari <https://jurnalamanah.com/index.php/amanahmengabdi>
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, D. K., Kencono, D. S., & Atmojo, M. E. (2024). Peran Pemerintah Kalurahan Hargorejo dalam Meningkatkan Ekonomi Melalui Digitalisasi UMKM. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 6(1), 57–67. <https://doi.org/10.18196/jpk.v6i1.24136>
- Firdaus, M. (2008). *Manajemen Agribisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fitri, S. D., & Bustanuddin. (2021). Analisis kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Journal of Constitutional Law*, 1(2), 280–293. Diambil dari <https://materibelajar.co.id/pengertian-pemerintah-menurut-para-ahli/>
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup.
- Hasan Quthbi, Z., Yulizam Safiq, M., Fatmiwati, N., Hasmi, N., Zinnuraini, M., Rahmah, H., ... Nur Fatsa Rahmatillah, M. (2023). Pendampingan UMKM dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Sajang Kapanewon Sembalun. *Al-Madani: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 2(1), 32–37.
- Kumalasari, B., & Asandimitra, N. (2019). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja UMKM di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 7.
- Kusnendar, A. (2018). Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Cijulang Kapanewon Cijulang Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5.
- Maisini, A. (2015). Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua. *Lex Administratum*, 3(4).

- Miftahulkhair. (2018). Pendampingan Sosial Terhadap Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kota Makassar. *Phinisi Integration Review*, 1(2).
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, W. (2024). Penyederhanaan Perizinan UMKM sebagai Perwujudan Keadilan Sosial dengan Pendekatan Masalah Mursalah dan UU Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 14(2).
- Najmudin, M., & Sunyoto, D. (2025). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Pengembangan UMKM Berbasis Potensi Lokal di Desa Sendangadi, Mlati, Sleman. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(11).
- Nawawi, Z. (2013). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugroho, S. S. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pub. L. No. 20, Sekretariat Negara RI (2008). Indonesia.
- Pristiyanti, D. C. (2016). Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Mayer Sukses Jaya. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(2).
- Rahayu, S., & Diatmika, I. P. G. (2025). Pendampingan UMKM Berbasis Produk Lokal dalam Membangun Brand yang Berkelaanjutan di Desa Labuhan Sumbawa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 43–48. Diambil dari https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index
- Saptadi, G. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, Pub. L. No. 25, Sekretaris Daerah DIY (2019). Indonesia.
- Sari, W., & Bakhri, S. (2022). Pemberdayaan Melalui Pelatihan dan Digitalisasi UMKM dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. *IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.18326/imej.v4i1.1-18>
- Seftianti, A., & Aziz, I. A. (2021). Pendampingan Produksi UMKM Dalam Meningkatkan Usaha Sale Pisang di Desa Padamulya. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 40–45.
- Setiawan, W. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kementerian Sekretariat Negara RI § (2014). Indonesia.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan* (12 ed.). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suparsa, I. G., Krisna, I. wayan A., Dewi, P. S., & Sulatra, I. K. (2022). *Pendampingan Pendataan UMKM dan Pembuatan Sertifikat Keterangan Usaha di Desa Dajan Peken. Prosiding Seminar Regional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mahasaswati Denpasar* (Vol. 1). Denpasar.

- Suyatno, S., & Suryani, D. A. (2022). Pengembangan Potensi UMKM Berbasis Lokal dalam Mendorong Perekonomian di Desa Girikerto, Sleman. *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*, 9(2), 108–118. <https://doi.org/10.21107/jsmb.v9i2.16821>
- Syahputra, M. R. (2021). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekabaru*. Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Thahir, B. (2019). Kebijakan Sosial dan Otonomi Daerah. *Jurnal kebijakan Pemerintahan*, (2).
- Thalib, M. (2023, Juni 14). *Peran Pemerintah dalam Menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung di Desa Batetanganga, Kec. Binung Kab. Polewali Mandar*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Parepare.
- Todaro, M. P., & Smith, S. (2015). *Pembangunan Ekonomi* (12 ed.). Jakarta: Erlangga.
- Widyastuti, N., & Rahardja, E. (2018). Analisis Pengaruh Stres Kerja, Kompensasi, dan Employee Engagement Terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada Pegawai PDAM Tirta Moedal Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Management*, 7(1), 1–11. Diambil dari <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>

LAMPIRAN

A. Panduan Wawancara

Nama Informan :

Jabatan/Pekerjaan :

Usia :

Tingkat Pendidikan :

Jenis Kelamin :

Tanggal Wawancara :

Daftar Pertanyaan

Pemerintah Kalurahan

1. Bagaimana bentuk kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM
2. Mengapa pemerintah perlu terlibat langsung dalam pengembangan UMKM
3. Bagaimana bentuk program atau kegiatan yang telah di lakukan pemerintah dalam membeberdayakan UMKM
4. Bagaimana pemerintah mengatasi faktor penghambat serta memaksimalkan faktor pendukung dalam pengembangan UMKM
5. Mengapa kebijakan atau program pemberdayaan UMKM perlu di sinergikan

Pelaku UMKM

1. Mengapa Anda merasa peran pemerintah kalurahan penting dalam pengembangan usaha Anda?
2. Bagaimana Anda menilai efektivitas program atau bantuan yang diberikan pemerintah kalurahan terhadap usaha Anda?
3. Mengapa masih ada kendala atau hambatan yang Anda alami meskipun sudah ada program pemberdayaan dari pemerintah?
4. Bagaimana bentuk dukungan yang paling Anda butuhkan dari pemerintah kalurahan untuk mengembangkan usaha?
5. Bagaimana pandangan Anda terhadap keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari program pemberdayaan UMKM di wilayah Anda?

Masyarakat

1. Mengapa menurut Anda pemerintah kalurahan perlu terlibat aktif dalam pemberdayaan UMKM di lingkungan sekitar?
2. Bagaimana pandangan Anda terhadap program-program pemerintah kalurahan yang ditujukan untuk mendukung UMKM di wilayah Anda?
3. Mengapa sebagian UMKM di lingkungan Anda masih belum

- berkembang meskipun telah mendapat dukungan dari pemerintah?
4. Bagaimana menurut Anda peran masyarakat dalam membantu keberhasilan program pemberdayaan UMKM dari pemerintah kalurahan?
 5. Mengapa penting bagi masyarakat untuk mengetahui dan mendukung kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM lokal?

B. Foto

Bersama, Anjani Anggraini Staf Ulu-Ulu



Bersama, Umarwanto, Ulu-ulu Kalurahan



Bersama Sumaryadi, Ketua Desa Preneur



Bersama, Ibu Yani, Toko Angkirangan



Bersama Ibu Dwi, Warung Raisa



Bersama Sabda, Mebel Kayu Subur Berkah



Bersama Pak Rijal, Toko Aneka Kue



Pelaku Usaha Yadi Handycraft,



C. Data UMKM di Guwosari

NO	NAMA	ALAMAT	BIDANG USAHA
1	Nurrohman	Bungsing	Usaha Bidang Otomotif
2	Nur Muhammad Aziz	Bungsing	Ternak ayam potong
3	Rokhman Hakim Al Kholili	Bungsing	Usaha Perdagangan
4	Indah Yusmiyati	Bungsing	Usaha Perdagangan
5	Khotimah	Dukuh RT 01	Perdagangan
6	Anang Wahyudin	Dukuh RT 05	Bengel Las
7	wahid alwi	Dukuh Rt01	Perdagangan
8	UNUN SYA'BANA	Dukuh Rt01	Fashion
9	Arifatun khasanah	Dukuh Rt03	Fashion
10	Heri Susanto	Dukuh Rt03	Jasa pertamanan dan tanaman hias
11	RASTAFARI YANUAR	Dukuh	Usaha Elektronik dan Gadget
12	Darim	Dukuh	Usaha Bidang Fashion
13	Zamzani	Dukuh	Usaha Bidang Fashion
14	Warsono	Dukuh	Usaha Pertanian
15	Muh. Fauzan	Dukuh	Pengrajin genteng
16	Nuryadi	Dukuh	Usaha Perdagangan
17	Muninjar	Dukuh	Usaha Kerajinan Tangan
18	Islam soleh	Dukuh	Sound sistem
19	Wahyudi	Dukuh	Usaha Pertanian

20	Nurhadi	Dukuh	Usaha Perdagangan
21	Mulyono	Dukuh	Usaha Kerajinan Tangan
22	Mahsun arifah	Dukuh	Usaha Bidang Fashion
23	Munawaroh	Dukuh	Usaha Perdagangan
24	Arina fitriana	Dukuh	Usaha Kuliner
25	Samsidah	Dukuh	Usaha Kuliner
26	Siti Zunifah	Dukuh	Usaha Perdagangan
27	SITI MASITOH	Dukuh	Usaha Kuliner
28	Dwi Irawati	Dukuh	Usaha Kuliner
29	SITI NUR AZIZAH	Dukuh	Usaha Kuliner
30	Siti Zumaroh	Dukuh	Usaha Bidang Fashion
31	Lia Agustina, A.Md	Dukuh	Usaha Perdagangan
32	RIRIN HARYANTI	Dukuh	Usaha Kuliner
33	Suprihatin Fatonah	Dukuh	Konstruksi
34	Yulia Dwi winarsih	Dukuh	Usaha Kuliner
35	Siti maryatul khotimah	Dukuh	Usaha Perdagangan
36	Endang Widuri	Dukuh	Usaha Perdagangan
37	Yuliyanto	Dukuh	Usaha Perdagangan
38	M Syam Suhadi	Dukuh,Rt 01	Perdagangan
39	Risa umami	Dukuh,Rt 01	Kuliner
40	Maulida Nur Andriani	Dukuh,Rt 01	Perdagangan
41	Nur hidayah	Dukuh,Rt 02	Kuliner
42	Mujiyono	Gandekan	Usaha Bidang Otomotif
43	Waginem	Gandekan	Usaha Kerajinan Tangan
44	Waldinem	Gandekan	Usaha Perdagangan
45	Mujiyono	Gandekan	Usaha Bidang Otomotif
46	Waginem	Gandekan	Usaha Kerajinan Tangan
47	Waldinem	Gandekan	Usaha Perdagangan
48	M.Harmawi	Gandekan Rt 02	Mebel
49	Siti mufidah	Gandekan	Usaha Bidang Fashion
50	Slamet Lestari	Gandekan	Cetak batu bata
51	MUH DJUMADI	Gandekan	Usaha Perdagangan
52	Mulyani	Gandekan	Usaha Kuliner
53	Wiwin oktiani	Gandekan	Usaha Perdagangan
54	Sarjiyati	Gandekan	Usaha Bidang Fashion
55	Tujiyati	Gandekan	Usaha Perdagangan
56	Siti Khoyrotu Sholikhah	Iroyudan	Usaha Perdagangan
57	Zahrodin	iroyudan	Usaha Perdagangan
58	Siti Mujahadah	iroyudan	Usaha Kuliner
59	Sarwanti	iroyudan	Usaha Perdagangan
60	Jamidah	iroyudan	Usaha Perdagangan
61	Siti Khoyrotu Sholikhah	iroyudan	Usaha Perdagangan
62	Zahrodin	iroyudan	Usaha Perdagangan
63	Siti Mujahadah	iroyudan	Usaha Kuliner
64	Sarwanti	iroyudan	Usaha Perdagangan
65	Jamidah	iroyudan	Usaha Perdagangan
66	Nur Ahmad	iroyudan	Usaha Kuliner
67	Sunardi	iroyudan	Usaha Bidang Fashion
68	Ramidi	iroyudan	Industri Pengolahan
69	MUH SUHARTO	iroyudan	Usaha Perdagangan
70	Sulikah	iroyudan	Usaha Perdagangan
71	Sri Wahyuni	iroyudan	Usaha Kerajinan Tangan
72	Siti Jamidah	iroyudan	Usaha Perdagangan

73	Yuyun Astuti	Iroyudan	Usaha Perdagangan
74	Mudrikah	Iroyudan	Usaha Perdagangan
75	Agus Subhan	Iroyudan	Usaha Kerajinan Tangan
76	Nur Ahmad	Iroyudan	Usaha Kuliner
77	Indriasari	Irroyudan rt 001	Jasa laundry
78	SITI NUR HIDAYAH	Irroyudan rt 004	Kuliner
79	Supriyanto	Kadisono	Usaha Elektronik dan Gadget
80	Parjinem	Kalakijo	Usaha Kuliner
81	Kasijan	Kalakijo	Usaha Kuliner
82	Nita Oktavia	Kalakijo	Usaha Elektronik dan Gadget
83	Agus Wahyudi	Kalakijo	Usaha mebel
84	Bariyanto	Kalakijo	Usaha Bidang Otomotif
85	Mustofa	Kalakijo	Usaha jasa servis bedhil
86	Clara Siti Nuriyah	Kalakijo	Usaha Perdagangan
87	Bu isnaini	Kalakijo	Usaha Perdagangan
88	Novita kuntari	Kalakijo	Usaha Perdagangan
89	Siti Aminah	Kalakijo	Usaha Bidang Fashion
90	Sri Suratmi	Kalakijo	Usaha Perdagangan
91	Mulatsih Wiyanti	Kalakijo	Usaha Kerajinan Tangan
92	Waljiyanti	Kalakijo	Usaha Kuliner
93	Tarmi	Kalakijo	Usaha Kuliner
94	Anton Hariyadi	Kalakijo	Usaha las teralis
95	Daliyem	Kalakijo	Usaha Perdagangan
96	Tri winarni	Karangber	Jasa
97	Muhammad chusaini	Karangber	Usaha Bidang Otomotif
98	Suraji	Karangber	Usaha Perdagangan
99	Azis Sukandar	Karangber	Bengkel las
100	Yusuf Prawoko	Karangber	Usaha Bidang Otomotif
101	Abdul bari	Karangber	Jasa
102	Daroji	Karangber	Usaha Perdagangan
103	Rusmiati	Karangber	Usaha Bidang Fashion
104	Isti zaenab	Karangber	Usaha Perdagangan
105	Sumiyati	Karangber	Usaha Bidang Fashion
106	Iis agustina	Karangber	Usaha Kuliner
107	Apriani	Karangber	Usaha Perdagangan
108	Melani suci rakhmantia	Karangber	Usaha Perdagangan
109	Siti fatimah	Karangber	Usaha Bidang Fashion
110	Siti Muntoharoh	Karangber	Usaha Kuliner
111	Purwati	Karangber	Usaha Perdagangan
112	Reni purwaningsih	Karangber	Usaha Kuliner
113	Fenti afriyani drissen	Karangber	Usaha Perdagangan
114	Ika yulianti	Karangber	Usaha Perdagangan
115	Sri mujiyati	Karangber	Usaha Kuliner
116	SITI KURNIA FATIMAH	Karangber Rt01	Kuliner
117	Abdul bari	Karangber	Jasa
118	Wagiman	Kedung	Mebel
119	Marwatun	Kedung	Usaha Kuliner
120	Mujeri	Kedung	Usaha mebel
121	Ayem	Kedung	Membuat emping
122	Wagiman	Kedung	Mebel
123	Marwatun	Kedung	Usaha Kuliner
124	Mujeri	Kedung	Usaha mebel
125	Ayem	Kedung	Membuat emping

126	M. NUR WAKHID	Kedung	JASA BENGKEL
127	Sarjono	Kedung	Usaha Perdagangan
128	Rohmad	Kedung	Usaha Elektronik dan Gadget
129	M.Azis Muslim	Kedung	Usaha Bidang Otomotif
130	Muslikan	Kedung	Peternakan
131	Subandel	Kedung	Usaha Perdagangan
132	Katiyah	Kedung	Jasa LAundry
133	Mufidah	Kedung	Usaha Perdagangan
134	Muslikah	Kedung	Usaha Perdagangan
135	Rahayu Dwi Pamungkas	Kedung	Jasa Salon
136	Fajar Zulyanti	Kembang Putihan	Usaha Perdagangan
137	SLAMET/NARTO DIHARJO	KEMBANGGEDE	MEBEL KAYU
138	MUDJAZANAH	KEMBANGGEDE	Usaha Perdagangan
139	SUPRIHATIN	KEMBANGGEDE	PRODUKSI BAHAN PANGAN
140	Ernawati Suryaningsih	Kembanggede	Usaha Perdagangan
141	Nurjanah	Kembanggede	Usaha Perdagangan
142	SAGIMAN	Kembanggede	Kuliner dan jasa emping
143	Supiyati	Kembanggede Rt 01	Kuliner
144	Fran Kurniawan	Kembanggede RT 03	Jual Beli online
145	Khusaini	Kembanggede Rt 04	Fashion
146	Sumiyati	Kembanggede RT01	Kuliner
147	Sumadi	Kembanggede RT02	Kuliner
148	HARIYANTI	Kembanggede	Usaha Kerajinan Tangan
149	NURIFATUN	Kembanggede	Usaha Perdagangan
150	Subandi	Kembanggede	Usaha Perdagangan
151	MARTAMAJI	Kembanggede	Usaha Bidang Otomotif
152	Wardiyah	Kembanggede	Usaha Kuliner
153	Dewi Lukitasari	Kembanggede	Usaha Bidang Pendidikan
154	HARIYANTI	Kembanggede	Usaha Kerajinan Tangan
155	Haryono	Kembanggede	Pengrajin
156	Nurul Hidayati	Kembangputihan Rt04	Kuliner
157	Salimah	Kembangputihan	Usaha Perdagangan
158	Kurniasih	Kembangputihan	Usaha Perdagangan
159	Fajar Hadiyanto	Kembangputihan	Usaha Kerajinan Tangan
160	Galih Nurmawanto	Kembangputihan	Usaha Kerajinan Tangan
161	Iswardi	Kembangputihan	Usaha Kerajinan Tangan
162	Wardiyanto	Kembangputihan	Usaha Kerajinan Tangan
163	Murtini	Kembangputihan	Usaha Bidang Otomotif
164	Murtini	Kembangputihan	Usaha Perdagangan
165	Imron	Kembangputihan	Usaha Bidang Fashion
166	Baidah	Kembangputihan	Usaha Perdagangan
167	Duroh Nasrifah	Kembangputihan	Usaha Perdagangan
168	Ponirah	Kembangputihan	Usaha Bidang Fashion
169	Nuryati	Kembangputihan	Usaha Kerajinan Tangan
170	Rahayu	Kembangputihan	SOUVENIR
171	Samilah	Kembangputihan	Usaha Bidang Fashion
172	DEBBY ARIS YULANA	Kembangputihan	Usaha Kerajinan Tangan
173	Siti Ngaisah	Kembangputihan	Usaha Kuliner
174	Murtijah	Kentolan kidul	Usaha Perdagangan
175	Murtijah	Kentolan kidul	Usaha Perdagangan
176	Mardhiyah	kentolan Kidul Rt01	Kuliner
177	Mardhiyah	kentolan Kidul Rt01	Kuliner
178	Jawadi	kentolan Kidul Rt02	Jual Beli

179	Jawadi	kentolan Kidul Rt02	Jual Beli
180	Sujikah	Kentolan Kidul Rt03	Jahit Karung Beras
181	Partiyah	Kentolan Kidul Rt03	Kuliner
182	Dwi Astuti	Kentolan Kidul Rt03	Jual beli
183	Nurul Syamsi	Kentolan Kidul Rt03	Kuliner
184	Joko Zukhroni	kentolan Kidul Rt04	Kuliner
185	Joko Zukhroni	kentolan Kidul Rt04	Kuliner
186	Heri irwanto	kentolan Kidul Rt04	Fashion
187	Dulhadi	kentolan Kidul Rt04	Peternakan
188	Sihono	kentolan Kidul Rt04	Peternakan
189	Afib zusron	Kentolan kidul	Jasa sewa sound sistem
190	Sugeng Budi santoso	Kentolan kidul	Usaha Elektronik dan Gadget
191	Mukmin sholihuddin	Kentolan kidul	Pembuatan batako
192	Haryanto	Kentolan kidul	Jasa cuci motor dan mobil
193	Fahmirul zami prasetya	Kentolan kidul	Usaha Perdagangan
194	Sutrisno	Kentolan kidul	Usaha laundry
195	Slamet widada	Kentolan kidul	Usaha Perdagangan
196	Muhammad fatkhirrohman	Kentolan kidul	Ternak ayam
197	Siti bayyinah	Kentolan kidul	Usaha Bidang Fashion
198	Lestari	Kentolan kidul	Usaha Perdagangan
199	Sri lestari	Kentolan kidul	Usaha Bidang Fashion
200	Ninik ratrini	Kentolan kidul	Usaha Bidang Fashion
201	Ambar mulyani	Kentolan kidul	Usaha Perdagangan
202	Siti muslimah	Kentolan kidul	Usaha Perdagangan
203	Mujiyah	Kentolan kidul	Usaha Kuliner
204	Sri kusdiyati	Kentolan kidul	Usaha Kuliner
205	Marjono	Kentolan lor	Usaha Perdagangan
206	Jariyah	Kentolan lor	Usaha Kuliner
207	Amat zaini	Kentolan lor	Usaha Kuliner
208	Marjono	Kentolan lor	Usaha Perdagangan
209	Jariyah	Kentolan lor	Usaha Kuliner
210	Amat zaini	Kentolan lor	Usaha Kuliner
211	Nailul muna	Kentolan lor rt 04	Menjual media tanam
212	Muhammad Sholikin	Kentolan lor	Usaha Bidang Fashion
213	Muh Munaji	Kentolan lor	Usaha Perdagangan
214	Wakijo	Kentolan lor	Usaha Bidang Fashion
215	Bisri	Kentolan lor	Jual mainan
216	Ahmad Zaini	Kentolan lor	Usaha Kuliner
217	Siswanto	Kentolan lor	Usaha Perdagangan
218	Ahmad Shidiq	Kentolan lor	Usaha Bidang Fashion
219	Sugiyono	Kentolan lor	Usaha Perdagangan
220	Waryanto	Kentolan lor	Usaha Mebel
221	Wariyanto	Kentolan lor	Mebel
222	Marjilah	Kentolan lor	Usaha Perdagangan
223	Isti'anah	Kentolan lor	Usaha Perdagangan
224	Sri wulandari	Kentolan lor	Usaha Kuliner
225	Siti hidayah	Kentolan lor	Warung kelontong
226	Rubiyah	Kentolan lor	Usaha Perdagangan
227	Susilo	Kentolan lor	Usaha Kuliner
228	Slamet riyanti	Kentolan lor	Usaha Perdagangan
229	Daryanti	Kentolan lor	Usaha Kuliner
230	Wahyudi	Kentolan lor	Jasa potong rambut
231	Boiman	Kentolan lor	Pengilingan padi

232	Sagimin	Kentolan lor	Laundry
233	Sagimin	Kentolan lor	Usaha Perdagangan
234	Firdaus ramdani	Kentolan lor	Usaha Kuliner
235	Kasidi	Kentolan lor	Mebel
236	BUDI MULYONO TUMIN	Kentolan lor	Usaha Perdagangan
237	Waryanto	Kentolan lor	Usaha Mebel
238	Ngadiman	Kentolan lor	Mebel
239	Mujirah	Kentolan lor	Usaha Perdagangan
240	Sri utami	Kentolan lor	Usaha Bidang Fashion
241	Sarjiyem	Kentolan lor	Warung es
242	Ardiyah	Kentolan lor	Pembuat tempe
243	Siti Siami	Kentolan lor	Usaha Bidang Fashion
244	Wiji	Kentolan lor	Penjual mainan
245	Sudiyem	Kentolan lor	Usaha Perdagangan
246	Amat zaini /walidjan	Kentolan lor	Toko matrial
247	MURYATI	PERUM GUWOSARI	Usaha Perdagangan
248	Tri Lestari	Perum Guwosari	Usaha Perdagangan
249	SAMIYARNI	Perum Guwosari	Usaha Perdagangan
250	KRISTIAN WULANDARI	Perum Guwosari	Usaha Perdagangan
251	Sutrisni	Perum Guwosari	Usaha Perdagangan
252	SULARNO	Perum Guwosari	INDUSTRI PENGOLAHAN
253	Supriyanto	Perum Guwosari	Usaha Bidang Fashion
254	Muryati	Perum Guwosari	Usaha Perdagangan
255	Sumarsih	Perum Guwosari	Industri Pengolahan
256	Muhammad Rofi'i	Perum Guwosari	Usaha Perdagangan
257	Darmawan Ilan Kasutama	Perum Guwosari	Usaha Perdagangan
258	Murni Krismiyatun	Perum Putihan Asri	Usaha Perdagangan
259	Isman	Pringgading	Usaha Perdagangan
260	SUPARTIN	PRINGGADING	Usaha Perdagangan
261	KARIJI	PRINGGADING	Usaha Perdagangan
262	Jumanah	Pringgading	Usaha Kuliner
263	Pardiyo	Pringgading	Usaha Perdagangan
264	Isman	Pringgading	Usaha Perdagangan
265	SUPARTIN	PRINGGADING	Usaha Perdagangan
266	KARIJI	PRINGGADING	Usaha Perdagangan
267	Jumanah	Pringgading	Usaha Kuliner
268	Pardiyo	Pringgading	Usaha Perdagangan
269	MARWANTO	PRINGGADING RT001	BATU CETAK
270	MARYADI	PRINGGADING RT001	DEKOR
271	GIMAN	PRINGGADING RT002	SUNGGING WAYANG
272	SURATMAN	PRINGGADING RT002	SUNGGING WAYANG
273	MANGKU	PRINGGADING RT004	BATIK KAYU
274	Ana Muslihati	Pringgading	Usaha Bidang Fashion
275	Indra Diana	Pringgading	Usaha Bidang Otomotif
276	Daldini	Pringgading	Usaha Kuliner
277	Nuriyanto	Pringgading	Usaha Kerajinan Tangan
278	Suratman	Pringgading	Usaha Perdagangan
279	Muh Jumadi	Pringgading	Usaha Pertanian
280	Dwi Jadmono	Pringgading	Usaha Kerajinan Tangan
281	Arwandi	Pringgading	Mebel
282	Trisno Mulyadi	Pringgading	Usaha Kerajinan Tangan
283	Giman	Pringgading	Usaha Kerajinan Tangan
284	Yanto	Pringgading	Usaha Perdagangan

285	Nuryanto	Pringgading	Usaha Perdagangan
286	Paijo	Pringgading	Usaha perikanan
287	Paijan	Pringgading	Bank Sampah
288	Suroto	Pringgading	Usaha Kerajinan Tangan
289	Aan Kurniawan, S.E	Pringgading	Usaha Bidang Fashion
290	juriman	Pringgading	Usaha Kuliner
291	Sukarman	Pringgading	Usaha Perdagangan
292	Suryanti	Pringgading	Usaha Perdagangan
293	Suparmi	Pringgading	Usaha Laundry
294	Aristia zulianti	Pringgading	Usaha Kuliner
295	Supartin	Pringgading	Usaha Perdagangan
296	Parjiyem	Pringgading	kecantikan
297	Dalliyati	Pringgading	Usaha Kuliner
298	Partiyah	Pringgading	Usaha Perdagangan
299	Gumyah	Pringgading	Usaha Bidang Fashion
300	Siti fatimah	Pringgading	Usaha Kerajinan Tangan
301	Eko Purwati	Pringgading	Usaha Perdagangan
302	Tumpiyah	Pringgading	Usaha Perdagangan
303	Ari Tri Cahyono	Pringgading	Usaha Bidang Fashion
304	Elsa Yudhistari	Santan Rt01	Kopi
305	SULISTIYONO	Santan Rt02	Bengkel las
306	Anirya Rohmawati	Santan Rt03	Kerajinan
307	Subkhan Nur Taufiq	Santan	Industri Pengolahan
308	Asngari	Santan	Industri Pengolahan
309	NUR WAKHID	Santan	PERCETAKAN
310	Sukaryono	Santan	Usaha Perdagangan
311	Tri Hartono	Santan	Usaha Kerajinan Tangan
312	Tri Hartono	Santan	Usaha Kerajinan Tangan
313	siti Fariyana	watugedug rt01	Fashion
314	dewi puspitasari	watugedug Rt01	Fashion
315	Herman	Watugedug Rt02	Kerajinan
316	Muhammad Alimin	watugedug RT05	Perdagangan
317	UJANG ZADIT TAQWA	Watugedug	Usaha Kuliner
318	Ikhsan	Watugedug	Usaha Kerajinan Tangan
319	Sarji	Watugedug	Usaha Perdagangan
320	Ade saputra	Watugedug	Usaha Kuliner
321	SAMIJO	Watugedug	Usaha Kerajinan Tangan
322	Agus Sutianta	Watugedug	Usaha Perdagangan
323	Muhammad Makhin	Watugedug	Usaha peternakan
324	Eko Musbiantoro	Watugedug	Usaha Peternakan
325	Purwanto	Watugedug	Usaha Bidang Otomotif
326	Muhammad zainudin	Watugedug	Bengkel las
327	Sarjiman	Watugedug	Kontruksi dan Las
328	Muhammad zainudin	Watugedug	Bengkel las